MENDORONG
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS

PADA SEKTOR INDUSTRI EKSTRAKTIF MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

NOMAN KRESNA MARTHA SENA ○ AHMAD SHOLIKIN
SAFIRA IMAS SADEVI ○ RESTU SYAM SARIATULLOH

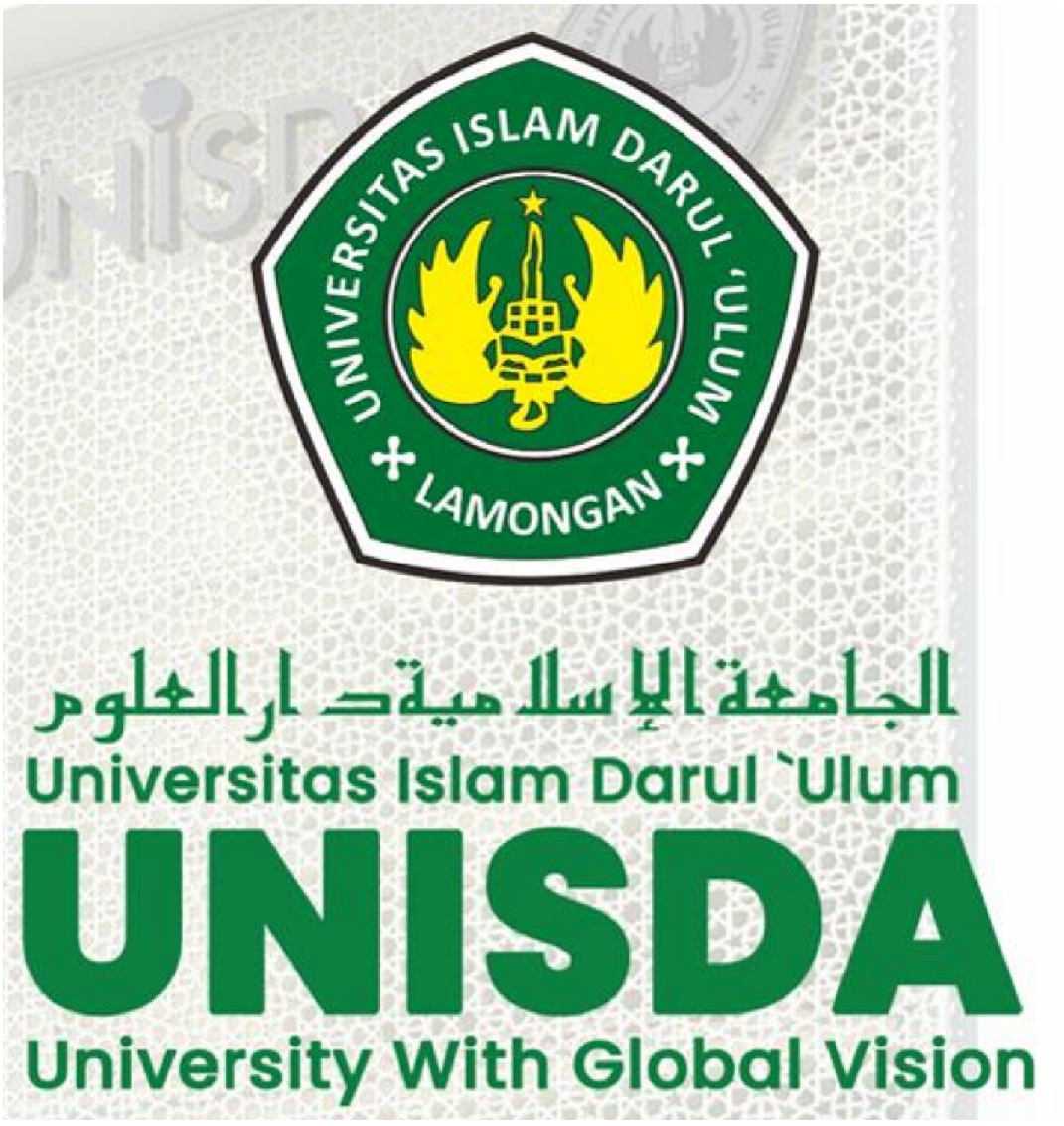
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
الجامعة الإسلامية دار العلوم
Universitas Islam Darul `Ulum
UNISDA
University With Global Vision

MENDORONG

TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS

PADA SEKTOR INDUSTRI EKSTRAKTIF MINYAK DAN GAS BUMI
UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO

NOMAN KRESNA MARTHA SENA ◦ AHMAD SHOLIKIN
SAFIRA IMAS SADEVI ◦ RESTU SYAM SARIATULLOH

Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas pada sektor Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro

NOMAN KRESNA MARTHA SENA

AHMAD SHOLIKIN

SAFIRA IMAS SADEVI

RESTU SYAM SARIATULLOH

Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas pada sektor Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro

Penulis:
Noman Kresna Martha Sena
Ahmad Sholikin
Safira Imas Sadevi
Restu Syam Sariatulloh

ISBN:
978-623-89410-7-0

Editor:
Ahmad Sholikin

Penyunting:
Ahmad Sholikin

Ukuran:
171 hlm, 18 x 25 cm

Desain Sampul dan Tata Letak:
Nurul Laili

Penerbit:

Redaksi
Jl. Airlangga 03 Sukodadi Lamongan
Telp.(0322) 390497
Faks.0322-390929
Email: unisdapress@unisda.ac.id
Website: https://unisdapress.unisda.ac.id/

Cetakan Pertama, Desember, 2024
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Kata Pengantar

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, dan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara ini adalah industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi. Sebagai salah satu penghasil minyak terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam hal eksploitasi sumber daya alam tersebut. Kabupaten Bojonegoro, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu daerah yang memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang signifikan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan kebutuhan energi global, industri ekstraktif di Bojonegoro semakin berkembang, membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah tersebut.

Namun, meskipun sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah dan nasional, tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu yang mendalam. Masalah utama yang sering kali muncul adalah ketidakjelasan dalam pengelolaan sumber daya alam, ketidaksetaraan dalam pembagian hasil, serta rendahnya tingkat pengawasan terhadap praktik perusahaan-perusahaan minyak dan gas. Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menggali lebih dalam permasalahan tersebut dan memberikan kontribusi pemikiran terkait bagaimana mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sektor industri ekstraktif minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro. Melalui kajian ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, serta bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga melibatkan kepentingan sosial dan lingkungan.

Sektor industri ekstraktif minyak dan gas bumi memang memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Di Bojonegoro, pendapatan dari industri minyak dan gas bumi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap anggaran daerah, yang digunakan untuk berbagai program pembangunan. Namun, ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pembagian hasil yang tidak adil sering kali menciptakan ketimpangan sosial dan ketidakpercayaan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan.

Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam industri ekstraktif bukanlah isu yang hanya terjadi di Bojonegoro, tetapi juga di banyak daerah penghasil minyak dan gas di Indonesia. Praktik-praktik seperti manipulasi data, penggelapan dana, serta

ketidakterbukaan dalam perjanjian-perjanjian bisnis sering kali menghambat pemanfaatan sumber daya alam yang seharusnya dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, meskipun sudah ada berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, implementasi di lapangan sering kali menemui kendala. Kurangnya pengawasan yang efektif, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, semakin memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperjuangkan.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sektor industri ekstraktif minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro. Buku ini tidak hanya akan mengulas tantangan-tantangan yang ada, tetapi juga menawarkan solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Lebih jauh lagi, buku ini bertujuan untuk mengajak berbagai pihak yang terlibat—baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat—untuk bersama-sama membangun sebuah sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya alam. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada

kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan cara yang adil, berkelanjutan, dan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dalam konteks sektor ekstraktif, transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa transparansi, informasi terkait pengelolaan sumber daya alam akan tertutup, yang dapat membuka ruang bagi praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa akuntabilitas, tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam, baik itu dampak sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Di Kabupaten Bojonegoro, pembangunan berkelanjutan dalam sektor minyak dan gas bumi harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari keberlanjutan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat lokal, hingga penyediaan akses yang adil terhadap hasil-hasil ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ini adalah langkah yang krusial untuk memastikan bahwa sektor ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, tanpa mengorbankan kesejahteraan jangka panjang.

Buku ini disusun dalam beberapa bab yang mengupas berbagai aspek terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor industri ekstraktif minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro. Bab pertama membahas latar belakang dan permasalahan yang ada, sedangkan bab-bab selanjutnya menggali lebih dalam tentang teori-teori yang mendasari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

Bab berikutnya akan membahas profil industri ekstraktif di Bojonegoro, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di daerah ini. Buku ini juga menyajikan berbagai rekomendasi dan strategi untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam, termasuk peran teknologi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan disusunnya buku ini, diharapkan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan yang terlibat dalam sektor ekstraktif di Bojonegoro dapat lebih memahami pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, buku ini juga berharap dapat memberikan kontribusi dalam mendorong perubahan menuju pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa sektor industri ekstraktif dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan

keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dengan komitmen bersama, Bojonegoro dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mengelola sumber daya alamnya secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, untuk kepentingan bersama.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan industri ekstraktif di Kabupaten Bojonegoro, serta menjadi kontribusi yang berharga dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penulis, 2024

Daftar Isi

Kata Pengantar iv

Bab 1 1

Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro 1

Bab 2 16

Membangun Transparansi dan Akuntabilitas pada Sektor Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi 16

Bab 3 42

Profil Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro: Tantangan dan Peluang untuk Pembangunan Berkelanjutan 42

Bab 4 70

Praktik Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Ekstraktif: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro 70

Bab 5 95

Tantangan Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas di Industri Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Bojonegoro 95

Bab 6 117

Langkah Strategis Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Industri Minyak dan Gas 117

Bab 7 132

Mewujudkan Transparansi: Implementasi dan Pemantauan Kebijakan di Industri Minyak dan Gas 132

Bab 8 140

Kesimpulan dan Harapan : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Ekstraktif 140

Daftar Pustaka 147

Bab 1

Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro

1. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas pada Sektor Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi

Sektor industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi, memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai negara dengan cadangan energi yang cukup besar, Indonesia memiliki potensi yang signifikan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia termasuk dalam 30 negara penghasil minyak dan gas terbesar di dunia. Industri minyak dan gas bumi ini berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan peranannya dalam menyumbang cadangan energi yang penting bagi kebutuhan energi domestik maupun ekspor.

Indonesia pertama kali menemukan minyak bumi pada akhir abad ke-19 di daerah Sumatera, dan sejak saat itu sektor minyak dan gas bumi menjadi sektor yang dominan dalam perekonomian nasional. Pada awalnya, sektor ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing yang memiliki pengaruh kuat

terhadap kebijakan energi negara. Namun, dengan berkembangnya sektor ini, Indonesia mulai memegang kendali lebih besar terhadap pengelolaan sumber daya alamnya. Meskipun demikian, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dalam sektor minyak dan gas bumi adalah bagaimana mengelola sumber daya alam ini secara berkelanjutan dan transparan, dengan tetap memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan (Fitzgerald, 2017).

Selama bertahun-tahun, sektor ini mengalami dinamika yang cukup kompleks. Selain sebagai penyumbang utama pendapatan negara melalui pajak dan ekspor energi, industri ekstraktif ini juga menghadapi banyak kritik terkait dampak lingkungan dan sosial. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak transparan sering kali menyebabkan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial, di mana masyarakat lokal tidak merasakan manfaat yang signifikan meskipun mereka tinggal di kawasan kaya energi. Selain itu, permasalahan sosial, seperti konflik antara pemerintah dan masyarakat lokal, sering muncul terkait pembagian hasil dari eksploitasi sumber daya alam ini.

Transparansi dalam industri ekstraktif menjadi isu yang semakin penting di Indonesia. Banyaknya praktik korupsi, ketidakjelasan kontrak-kontrak yang ditandatangani antara pemerintah dan perusahaan, serta rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, membuat masyarakat sering kali kehilangan kepercayaan terhadap industri ini. Akuntabilitas juga

menjadi salah satu tantangan utama, terutama terkait dengan pengelolaan dana hasil eksploitasi sumber daya alam yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pengelolaan sektor ini. Inisiatif seperti EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), yang diterima oleh Indonesia pada tahun 2010, berusaha untuk mendorong transparansi dalam industri ekstraktif, namun implementasi dan pemantauan yang efektif masih menjadi masalah besar (Levin & Lantagne, 2019). Proses transparansi ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan industri ekstraktif dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam bertanggung jawab atas dampak yang dihasilkan.

Bojonegoro adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama dalam sektor minyak dan gas bumi. Kabupaten ini telah lama dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak utama di Indonesia, dengan beberapa ladang minyak besar yang tersebar di wilayahnya. Sejak ditemukannya ladang minyak pertama di Bojonegoro pada tahun 1930-an, daerah ini telah menjadi salah satu pusat produksi energi yang penting.

Bojonegoro memiliki beberapa blok minyak yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, baik nasional maupun

internasional, seperti PT. Pertamina dan perusahaan minyak asing yang beroperasi di wilayah tersebut. Pada tahun 2000-an, produksi minyak dari Bojonegoro mencapai lebih dari 30.000 barel per hari, menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia. Selain minyak, Bojonegoro juga dikenal memiliki potensi gas alam yang cukup besar, yang turut berkontribusi pada cadangan energi nasional.

Sumber daya alam ini tentunya memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah Bojonegoro. Pada tahun 2018, sektor minyak dan gas bumi menyumbang hampir 50% dari total pendapatan daerah, dan sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan daerah. Dengan demikian, Bojonegoro memiliki potensi untuk mempercepat pembangunan infrastrukturnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, keuntungan ekonomi yang diperoleh dari sektor ini belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar lokasi pengeboran.

Meskipun Bojonegoro mendapat manfaat ekonomi dari sektor minyak dan gas, transparansi dalam pengelolaan hasil eksploitasi menjadi isu yang sering diperbincangkan. Selama ini, masyarakat lokal sering merasa bahwa mereka tidak memperoleh manfaat yang setimpal dengan dampak yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam pembagian hasil, serta minimnya partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di daerah mereka (Nasution et al., 2021).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan industri minyak dan gas di Bojonegoro sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari sektor ini benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat lokal dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh Bojonegoro tidak hanya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa proses eksploitasi dan pembagian hasil dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Di Indonesia, sektor minyak dan gas bumi tidak hanya menghadapi tantangan dari sisi teknis dalam hal eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga masalah yang lebih mendalam terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah rendahnya tingkat keterbukaan informasi mengenai pengelolaan sumber daya alam, baik dari sisi pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Tanpa adanya transparansi yang memadai, perusahaan dan pemerintah sering kali memiliki ruang untuk melakukan praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti penggelapan dana atau pembagian hasil yang tidak adil (Bhandari & Bhattarai, 2019).

Selain itu, akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ini juga sangat rendah. Dalam banyak kasus, hasil eksploitasi minyak dan

gas yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sering kali tidak teralokasikan dengan tepat. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan ekonomi bagi daerah sering kali menjadi sumber konflik, ketidakadilan sosial, dan kerusakan lingkungan. Kurangnya pengawasan yang efektif terhadap kegiatan perusahaan-perusahaan minyak dan gas, baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga independen, memperburuk kondisi ini.

Masalah transparansi dan akuntabilitas juga diperparah oleh faktor politik yang sering kali mempengaruhi pengambilan keputusan terkait pengelolaan sektor ekstraktif. Politik lokal yang tidak stabil dan intervensi dari pihak-pihak tertentu sering kali menjadi penghalang bagi implementasi kebijakan yang adil dan transparan. Di Bojonegoro, meskipun pemerintah daerah telah berusaha untuk memperbaiki sistem pengelolaan minyak dan gas, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa mereka tidak mendapat bagian yang adil dari hasil eksploitasi tersebut. Hal ini juga terkait dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan tidak meratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Rachman, 2020).

Dalam konteks ini, upaya untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas di sektor ekstraktif sangat penting. Beberapa kebijakan dan inisiatif, seperti EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) dan penguatan peran masyarakat dalam pengawasan, telah mulai diterapkan untuk mendorong

keterbukaan dan akuntabilitas dalam sektor ini. Namun, untuk mewujudkan perubahan yang signifikan, diperlukan komitmen yang lebih besar dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang dimiliki benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sektor industri ekstraktif minyak dan gas bumi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bojonegoro, menghadapi berbagai masalah terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Permasalahan ini menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan yang merugikan masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan itu sendiri. Beberapa permasalahan utama yang muncul dalam sektor ini antara lain:

1. Ketidakjelasan Pembagian Hasil

   Salah satu masalah transparansi yang paling signifikan dalam industri minyak dan gas di Bojonegoro adalah ketidakjelasan dalam pembagian hasil dari eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan perusahaan. Masyarakat sering kali tidak merasa bahwa mereka mendapatkan manfaat yang adil, meskipun daerah mereka kaya akan sumber daya alam. Hasil dari industri ekstraktif seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi sering kali dana tersebut tidak

terdistribusi secara merata atau tidak sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

2. Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

   Transparansi yang rendah sering kali membuka ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh pihak perusahaan maupun pejabat pemerintah. Misalnya, dalam proses perizinan dan pengelolaan kontrak antara perusahaan dan pemerintah daerah, sering kali terjadi ketidakjelasan dan manipulasi yang merugikan kepentingan publik. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang kuat, banyak potensi pendapatan yang tidak tercatat dengan baik atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

3. Keterbatasan Akses Informasi bagi Masyarakat

   Salah satu hambatan utama dalam mendorong transparansi di sektor ini adalah kurangnya akses informasi yang jelas dan terbuka bagi masyarakat. Masyarakat lokal di sekitar lokasi pengeboran minyak sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai aktivitas perusahaan, kontrak yang ditandatangani, serta aliran dana yang masuk ke daerah tersebut. Tanpa informasi yang memadai, masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.

4. Kurangnya Pengawasan yang Efektif

   Akuntabilitas dalam industri ekstraktif di Bojonegoro juga sering terkendala oleh kurangnya pengawasan yang efektif, baik dari pemerintah daerah maupun lembaga independen. Meskipun ada regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, pengawasan yang lemah memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap standar lingkungan, sosial, dan ekonomi yang telah ditetapkan. Selain itu, ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban perusahaan dan pihak terkait menyebabkan kesulitan dalam menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan atau ketidakpatuhan terhadap aturan.

5. Peran Teknologi dan Data dalam Meningkatkan Transparansi

   Teknologi informasi dan data yang lebih baik dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif. Namun, penerapan teknologi ini di Bojonegoro masih terbatas. Pemanfaatan sistem yang transparan untuk memantau aliran dana, aktivitas produksi, serta dampak sosial dan lingkungan dari eksploitasi minyak dan gas belum maksimal. Masyarakat dan pemerintah sering kali tidak memiliki alat yang memadai untuk memantau kegiatan industri ini secara real-time dan dengan akses yang mudah dipahami.

6. Dampak Lingkungan yang Tidak Terawasi dengan Baik

   Masalah lain yang sering muncul dalam industri minyak dan gas adalah dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan eksploitasi. Kurangnya akuntabilitas dalam hal pengelolaan dampak lingkungan sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak terdeteksi dengan cepat. Padahal, salah satu aspek penting dalam transparansi adalah pengelolaan dampak lingkungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dan pemerintah.

7. Keterbatasan Partisipasi Masyarakat

   Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam merupakan masalah utama dalam sektor ini. Masyarakat sekitar wilayah penghasil minyak dan gas sering merasa terpinggirkan dalam perencanaan dan pengelolaan kegiatan eksploitasi. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap proses yang ada dan menghambat terciptanya solusi yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, masalah utama yang perlu dipecahkan adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh proses yang melibatkan eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Bojonegoro berlangsung secara transparan dan akuntabel,

sehingga manfaat dari sumber daya alam tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Penulisan buku ini bertujuan untuk mendorong perubahan menuju transparansi dan akuntabilitas dalam sektor industri ekstraktif minyak dan gas bumi, dengan fokus pada Kabupaten Bojonegoro. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya kedua konsep tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam dan bagaimana penerapannya dapat memperbaiki pengelolaan industri ekstraktif di daerah tersebut. Secara lebih spesifik, tujuan dari penulisan buku ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemahaman tentang Transparansi dan Akuntabilitas

   Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ekstraktif, khususnya dalam industri minyak dan gas bumi. Pembaca diharapkan dapat memahami bagaimana rendahnya transparansi dan akuntabilitas dapat merugikan masyarakat dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah penghasil energi seperti Bojonegoro.

2. Mengidentifikasi Masalah yang Ada di Sektor Ekstraktif

Buku ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang terjadi di sektor ekstraktif minyak dan gas bumi di Bojonegoro, baik dari sisi pengelolaan sumber daya alam, ketidakadilan sosial, maupun dampak lingkungan. Dengan mengidentifikasi masalah ini secara jelas, buku ini dapat memberikan dasar bagi upaya perbaikan yang lebih terstruktur dan efektif.

3. Mendorong Implementasi Kebijakan yang Lebih Transparan dan Akuntabel

   Buku ini bertujuan untuk mengusulkan solusi konkret dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, baik melalui kebijakan pemerintah, regulasi perusahaan, maupun peran serta masyarakat dalam pengawasan. Diharapkan, rekomendasi yang dihasilkan dari buku ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan pihak-pihak terkait dalam merancang kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan industri ekstraktif.

4. Memberikan Panduan Praktis untuk Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat

   Buku ini juga bertujuan untuk memberikan panduan praktis tentang bagaimana pihak-pihak terkait dapat berkolaborasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor ekstraktif. Ini termasuk penggunaan

teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan sistem pengawasan.

Penulisan buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak yang terlibat dalam industri ekstraktif di Kabupaten Bojonegoro. Beberapa manfaat utama yang diharapkan adalah:

1. Manfaat bagi Masyarakat

   Masyarakat Bojonegoro, khususnya yang tinggal di sekitar wilayah penghasil minyak dan gas, diharapkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari eksploitasi sumber daya alam. Dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat memastikan bahwa hasil dari industri ekstraktif benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, baik melalui program pembangunan daerah, penyediaan fasilitas publik, maupun peningkatan kualitas hidup secara umum. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan industri akan memperkuat kontrol sosial terhadap perusahaan dan pemerintah.

2. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

   Bagi pemerintah daerah, buku ini dapat menjadi referensi dalam merancang kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah dapat

menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, mengurangi potensi konflik sosial, dan memastikan bahwa hasil dari eksploitasi sumber daya alam digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya sistem yang lebih transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah juga dapat meningkat.

3. Manfaat bagi Perusahaan

   Bagi perusahaan yang beroperasi di sektor minyak dan gas, buku ini memberikan wawasan tentang pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemerintah melalui praktik yang transparan dan akuntabel. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan jangka panjang dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seperti peningkatan reputasi perusahaan, pengurangan risiko konflik, dan pencapaian izin operasional yang lebih mudah. Selain itu, dengan meningkatkan transparansi, perusahaan juga dapat menghindari potensi masalah hukum dan sosial yang dapat merugikan keberlanjutan operasional mereka.

4. Manfaat bagi Pembangunan Berkelanjutan di Bojonegoro

   Dengan mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sektor minyak dan gas, Bojonegoro dapat memanfaatkan potensi sumber daya alamnya secara optimal untuk pembangunan berkelanjutan. Hasil yang

diperoleh dari sektor ini dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan solusi terhadap masalah yang ada, tetapi juga berperan sebagai sumber informasi yang berguna bagi berbagai pihak untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.

Bab 2

Membangun Transparansi dan Akuntabilitas pada Sektor Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi

1. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Konteks Industri Ekstraktif

Industri ekstraktif, yang meliputi sektor-sektor seperti pertambangan, minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya, merupakan sektor yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian global dan ekonomi negara-negara penghasilnya. Sebagian besar negara-negara berkembang, terutama yang kaya akan sumber daya alam, sangat bergantung pada industri ini untuk menghasilkan pendapatan yang besar dan mendukung pembangunan infrastruktur serta penciptaan lapangan pekerjaan.

Namun, sektor ekstraktif juga sering kali dikaitkan dengan berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang serius, termasuk eksploitasi terhadap pekerja, kerusakan lingkungan, serta ketidakadilan distribusi hasil kekayaan alam. Salah satu isu utama yang muncul dalam sektor ini adalah ketidaktransparanan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban terhadap dampak yang ditimbulkan. Ini mengarah pada masalah yang lebih besar terkait dengan korupsi, ketidakadilan sosial, dan kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua konsep yang sangat penting dalam industri ekstraktif. Konsep-konsep ini memiliki peran kunci dalam memperbaiki praktik dalam industri ini, serta dalam menciptakan suatu sistem yang lebih adil dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam tulisan ini, kita akan membahas secara mendalam tentang definisi transparansi dan akuntabilitas, serta pentingnya kedua konsep tersebut dalam sektor industri ekstraktif.

Transparansi, dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai praktik memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh publik mengenai kegiatan dan keputusan yang diambil oleh entitas, baik itu perusahaan ekstraktif, pemerintah, atau lembaga pengatur. Dalam sektor ekstraktif, transparansi mencakup penyediaan informasi mengenai berbagai hal, seperti:

1. Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif kepada pemerintah: Ini termasuk pajak, royalti, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh pemerintah dari perusahaan yang mengelola sumber daya alam.
2. Dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan industri ekstraktif, termasuk kerusakan ekosistem, polusi, serta pengaruh terhadap kehidupan masyarakat lokal.

3. Kebijakan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan dalam melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam.
4. Pengelolaan dan distribusi pendapatan negara yang berasal dari sektor ekstraktif, serta alokasi dana untuk pembangunan sosial dan infrastruktur.

Transparansi ini sangat penting karena memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau dan menilai kinerja perusahaan serta pemerintah, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Open Government Partnership (OGP, 2020), transparansi adalah sebuah prinsip yang mencakup menyediakan informasi kepada publik dalam bentuk yang dapat dipahami dan digunakan untuk kepentingan bersama. Dalam industri ekstraktif, transparansi berarti bahwa semua pihak yang terlibat—baik itu pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat—dapat mengakses informasi yang akurat dan tepat waktu tentang aktivitas yang berlangsung.

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka, baik itu dalam konteks kebijakan, keuangan, maupun dampak lingkungan. Dalam sektor ekstraktif, akuntabilitas berarti bahwa perusahaan

dan pemerintah harus siap untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan yang diambil serta bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan oleh tindakan mereka.

Akuntabilitas juga mencakup mekanisme untuk memantau dan mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut, yang dapat mencakup audit independen, laporan reguler tentang kinerja perusahaan, serta penegakan hukum terhadap praktik yang melanggar aturan. Akuntabilitas yang kuat juga memungkinkan masyarakat untuk menuntut perubahan jika terdapat ketidakadilan atau ketidaksesuaian antara kebijakan yang dijanjikan dan yang terlaksana.

Robert Klitgaard (2012) dalam bukunya *Controlling Corruption* menekankan bahwa akuntabilitas hanya dapat tercapai jika ada transparansi yang memadai. Tanpa transparansi, akan sulit bagi pihak-pihak terkait untuk menilai apakah tindakan yang diambil oleh pemerintah atau perusahaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, atau apakah terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu alasan transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam industri ekstraktif adalah karena tingginya potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Industri ekstraktif sering kali melibatkan transaksi besar yang melibatkan uang dan kekuasaan, sehingga rawan terhadap praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Ketika informasi tentang transaksi finansial dan kebijakan pengelolaan sumber

daya alam tidak tersedia atau sulit diakses, pihak-pihak yang terlibat bisa menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi.

Transparansi dapat mengurangi korupsi dengan memastikan bahwa informasi terkait transaksi dan keputusan penting dapat diakses oleh publik dan diperiksa oleh pihak yang berwenang. Salah satu upaya internasional yang berhasil untuk memastikan transparansi dalam sektor ekstraktif adalah Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI), yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah. Hal ini memungkinkan publik untuk memverifikasi apakah jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan dan kontrak yang ada, serta apakah pemerintah benar-benar mengalokasikan dana yang diterima untuk kepentingan publik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Baker et al. (2018), negara-negara yang menerapkan standar transparansi seperti EITI cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menerapkan standar tersebut. Ini menunjukkan bahwa transparansi yang lebih besar dalam industri ekstraktif dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat korupsi.

Transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting dalam membangun kepercayaan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Sektor ekstraktif sering kali beroperasi di daerah-

daerah yang sensitif secara sosial dan lingkungan, di mana kegiatan eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan serta ketegangan dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang jelas dan transparan mengenai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka.

Ketika perusahaan bersedia untuk memberikan informasi yang lengkap dan terbuka, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Coyle-Shapiro et al. (2020) menemukan bahwa perusahaan yang menunjukkan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan dampak sosial dan lingkungan mereka lebih cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Kepercayaan ini, pada gilirannya, dapat mengurangi konflik sosial dan mempercepat proses persetujuan untuk proyek-proyek ekstraktif yang diperlukan.

Industri ekstraktif, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memberikan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan deforestasi adalah beberapa contoh dampak yang sering terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas

dampak yang ditimbulkan dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Transparansi dalam hal dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan ekstraktif memungkinkan masyarakat untuk mengetahui kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Selain itu, hal ini juga memudahkan organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga pengawas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.

Akuntabilitas juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan tidak hanya melaporkan dampak negatif yang timbul, tetapi juga memperbaiki kerusakan yang terjadi. Jika perusahaan tidak dapat mempertanggungjawabkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, hal ini dapat memicu protes, boikot, atau bahkan litigasi yang dapat merugikan reputasi dan operasional perusahaan.

Menurut Morse et al. (2017), perusahaan ekstraktif yang tidak transparan dalam melaporkan dampak lingkungan dan sosial mereka sering menghadapi reaksi negatif dari masyarakat dan akhirnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin untuk melanjutkan operasi mereka.

Transparansi dalam pengelolaan pendapatan yang dihasilkan oleh industri ekstraktif sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan cara yang

adil dan berkelanjutan. Sektor ekstraktif dapat menghasilkan pendapatan yang sangat besar bagi negara, tetapi sering kali pendapatan tersebut tidak dikelola dengan baik. Akuntabilitas dalam hal ini berarti bahwa pemerintah dan perusahaan harus bertanggung jawab atas bagaimana pendapatan yang dihasilkan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

Negara-negara yang memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti Norwegia dan Botswana, sering kali dapat menghindari perangkap resource curse (kutukan sumber daya) yang sering melanda negara-negara dengan kekayaan alam yang melimpah tetapi dikelola dengan buruk. Dalam penelitian Gelb (2010), disebutkan bahwa transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta pengurangan ketidaksetaraan sosial.

Transparansi dan akuntabilitas dalam industri ekstraktif merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, transparansi tidak hanya mencakup aksesibilitas informasi mengenai keuangan dan dampak lingkungan, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan

pelaporan. Akuntabilitas, di sisi lain, memastikan bahwa perusahaan dan pemerintah bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kedua konsep ini memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi, membangun kepercayaan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penerapan standar transparansi yang ketat dan sistem akuntabilitas yang efektif sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dari sektor ekstraktif, sambil meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Jika sektor ekstraktif dapat dikelola dengan lebih transparan dan akuntabel, maka bukan tidak mungkin negara-negara penghasil sumber daya alam dapat menikmati manfaat yang lebih besar dari kekayaan alam mereka, sementara masyarakat luas juga mendapatkan dampak positif berupa pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

2. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan konsep yang semakin menjadi pusat perhatian dalam berbagai diskusi internasional, terutama dalam konteks ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan mengedepankan upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini tidak hanya penting untuk negara-negara maju, tetapi juga sangat relevan

bagi negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, khususnya negara-negara yang bergantung pada sektor industri ekstraktif.

Sektor ekstraktif, yang mencakup kegiatan pertambangan, minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya, sering kali dipandang sebagai sektor yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, sektor ini juga dikenal dengan dampak negatifnya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi lokal, yang berpotensi menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan bagaimana sektor ekstraktif dapat berperan dalam mendukung atau justru menghalangi tujuan tersebut.

Pembangunan berkelanjutan pertama kali diakui secara internasional melalui laporan Brundtland Commission pada tahun 1987 dalam laporan yang berjudul *Our Common Future*. Dalam laporan tersebut, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai: "Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri." Definisi ini menekankan tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga pilar ini harus dijaga keseimbangannya agar pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan atau memperburuk ketidakadilan sosial di masa depan.

Menurut United Nations (2015) dalam Sustainable Development Goals (SDGs), pembangunan berkelanjutan mencakup upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial serta melindungi lingkungan hidup. SDGs terdiri dari 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan

1. Pilar Ekonomi: Pilar ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi harus bisa menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil.
2. Pilar Sosial: Pilar sosial berkaitan dengan keadilan sosial dan pemerataan akses terhadap sumber daya. Ini mencakup pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan komunitas, serta perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan, seperti masyarakat miskin dan minoritas.
3. Pilar Lingkungan: Pilar ini berfokus pada pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Ini mencakup pengurangan emisi karbon, pelestarian keanekaragaman hayati,

pengelolaan air yang berkelanjutan, dan pencegahan kerusakan lingkungan lainnya.

Jackson (2011) dalam bukunya *Prosperity Without Growth* menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang tidak hanya memperhatikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan berfokus pada pencapaian kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, baik sekarang maupun di masa depan. United Nations (2015) melalui SDGs merumuskan 17 tujuan yang meliputi berbagai aspek pembangunan, dengan tujuan utama untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, dan melindungi bumi dari kerusakan lingkungan.

Beberapa tujuan yang lebih spesifik dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah:

1. Mengurangi Ketimpangan Ekonomi: Tujuan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta peningkatan kualitas hidup di berbagai lapisan masyarakat.
2. Memastikan Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan: Tujuan ini berfokus pada bagaimana mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan meminimalkan

dampak negatif terhadap lingkungan, yang sangat relevan dengan sektor ekstraktif.

3. Melindungi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem: Tujuan ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan memastikan bahwa kegiatan manusia, termasuk eksploitasi sumber daya alam, dilakukan dengan cara yang tidak merusak ekosistem.
4. Memperkuat Kemitraan Global: Tujuan ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam hal investasi dan transfer teknologi.

Industri ekstraktif memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi global, mengingat sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan bahan baku bagi sektor industri lainnya. Namun, sektor ini juga sering dikritik karena dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sektor ekstraktif dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapainya.

Kontribusi Industri Ekstraktif terhadap Pembangunan Berkelanjutan

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja: Industri ekstraktif dapat memberikan kontribusi signifikan

terhadap ekonomi negara, terutama negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif sering kali digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor sosial lainnya. Selain itu, sektor ini juga menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, baik langsung di perusahaan ekstraktif maupun dalam sektor-sektor terkait seperti transportasi dan jasa.

2. Pemenuhan Kebutuhan Energi dan Bahan Baku: Sektor ekstraktif juga memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku untuk sektor industri. Minyak, gas, dan mineral lainnya digunakan dalam berbagai sektor produksi, mulai dari energi, manufaktur, hingga teknologi tinggi.

Namun, kontribusi sektor ekstraktif terhadap pembangunan berkelanjutan tidak selalu berjalan mulus. Seringkali, dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dampak Negatif Industri Ekstraktif terhadap Pembangunan Berkelanjutan

1. Kerusakan Lingkungan: Kegiatan ekstraktif sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar, seperti deforestasi, pencemaran air, tanah, dan udara, serta

hilangnya keanekaragaman hayati. Menurut International Institute for Environment and Development (IIED, 2020), aktivitas pertambangan dan pengeboran minyak dapat merusak ekosistem yang sangat sensitif, seperti hutan hujan tropis dan lahan basah, yang penting untuk pengaturan iklim dan keanekaragaman hayati.

2. Pengabaian Terhadap Komunitas Lokal: Masyarakat yang tinggal di sekitar area ekstraksi sering kali menjadi korban dari dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan ekstraktif. Mereka mungkin mengalami penggusuran paksa, kehilangan mata pencaharian, atau terpapar polusi yang dapat merusak kesehatan mereka. Tosun et al. (2017) mencatat bahwa dalam banyak kasus, keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ekstraktif tidak dibagikan dengan adil kepada masyarakat lokal.

3. Kekayaan Alam yang Tidak Berkelanjutan: Industri ekstraktif sering kali bersifat eksploitasi dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek, yang menyebabkan ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Tanpa pengelolaan yang hati-hati, sumber daya alam ini dapat habis, meninggalkan kerugian yang tak terpulihkan bagi masyarakat dan lingkungan.

Untuk memastikan bahwa industri ekstraktif dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, perlu ada perubahan

dalam cara sektor ini dikelola. Beberapa prinsip yang perlu diterapkan adalah:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bertanggung Jawab: Sumber daya alam harus dikelola dengan cara yang mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ini termasuk penerapan praktik ramah lingkungan dalam operasi pertambangan dan pengeboran, serta pemulihan lahan pasca-eksploitasi.

2. Penggunaan Teknologi Bersih dan Efisien: Industri ekstraktif dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi teknologi yang mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi energi. Teknologi ini dapat mencakup penggunaan energi terbarukan, proses produksi yang lebih bersih, dan pengelolaan limbah yang lebih baik.

3. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Perusahaan ekstraktif harus memastikan bahwa masyarakat yang terdampak kegiatan mereka mendapat manfaat langsung dari pendapatan yang dihasilkan. Ini bisa dilakukan dengan membangun infrastruktur, menyediakan pendidikan dan pelatihan, serta berinvestasi dalam program kesehatan masyarakat.

4. Transparansi dan Akuntabilitas: Seperti yang telah dibahas sebelumnya, transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan dari industri ekstraktif digunakan dengan bijaksana. Penerapan standar transparansi global seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dapat membantu mencegah korupsi dan memastikan bahwa pendapatan dari sumber daya alam digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan industri ekstraktif. Sektor ekstraktif dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku. Namun, sektor ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan industri ekstraktif, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, adopsi teknologi bersih, pemberdayaan komunitas lokal, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan yang tepat, industri ekstraktif dapat menjadi sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan, bukan menghambatnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan

berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan global yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Kerangka Hukum dan Kebijakan

Sektor minyak dan gas bumi merupakan salah satu sektor yang paling vital dalam perekonomian dunia. Di berbagai negara, terutama yang kaya akan sumber daya alam, sektor ini berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, penyediaan energi, dan pembangunan ekonomi. Namun, sektor ini juga seringkali terlibat dalam isu-isu besar seperti dampak lingkungan, ketidakadilan sosial, dan korupsi, yang menciptakan kebutuhan mendesak akan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas dan efektif. Dalam konteks ini, aturan dan regulasi yang berlaku untuk sektor minyak dan gas sangat penting untuk mengelola potensi risiko dan memastikan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam ini memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu utama dalam pengelolaan sektor minyak dan gas, karena ketidakjelasan dalam aliran pendapatan dan keputusan yang tidak transparan dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi. Oleh karena itu, penerapan kebijakan dan undang-undang yang menjamin transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam analisis ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai aturan dan regulasi yang mengatur sektor minyak dan gas bumi, serta undang-undang dan kebijakan terkait transparansi dan akuntabilitas. Kami akan mengulas berbagai regulasi internasional dan nasional yang diterapkan di negara-negara penghasil minyak, serta dampak dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Referensi dari buku dan jurnal internasional dalam 10 tahun terakhir akan digunakan untuk memberikan wawasan dan perspektif yang lebih komprehensif mengenai topik ini.

Sektor minyak dan gas bumi tidak hanya diatur oleh hukum nasional, tetapi juga oleh aturan internasional yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan dari sumber daya alam ini. Beberapa inisiatif global memiliki peranan penting dalam membentuk kerangka hukum dan kebijakan sektor ini.

EITI adalah salah satu inisiatif internasional yang paling penting yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam industri ekstraktif, termasuk sektor minyak dan gas. EITI mendorong negara-negara penghasil sumber daya alam untuk mempublikasikan informasi mengenai pendapatan yang diterima dari kegiatan ekstraktif, termasuk dari perusahaan-perusahaan minyak dan gas. Inisiatif ini telah diadopsi oleh lebih dari 50 negara dan bertujuan untuk mencegah korupsi, meningkatkan

akuntabilitas, dan memastikan bahwa pendapatan dari sektor ini digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut laporan EITI (2020), lebih dari 50 negara telah mengadopsi standar transparansi ini. Negara-negara ini diwajibkan untuk mempublikasikan laporan tahunan yang merinci bagaimana pendapatan dari sektor ekstraktif dibagikan antara negara dan perusahaan, serta bagaimana aliran pendapatan tersebut digunakan. Pengawasan independen terhadap laporan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional yang terkait.

- International Finance Corporation (IFC) dan World Bank

IFC, sebagai lembaga keuangan internasional yang terafiliasi dengan Bank Dunia, memiliki pedoman yang dirancang untuk meminimalkan risiko sosial dan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek-proyek yang dibiayai oleh lembaga ini, termasuk proyek-proyek sektor minyak dan gas. Pedoman ini mencakup kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak, serta mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan oleh operasi mereka.

World Bank juga memiliki program yang bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara penghasil minyak dan gas mengelola sumber daya mereka dengan bijaksana. Program ini melibatkan pemberian dana kepada negara-negara berkembang

untuk memperkuat pengelolaan sektor minyak dan gas melalui kebijakan yang transparan dan berkelanjutan.

- United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)

UNGPs adalah pedoman internasional yang memberikan prinsip-prinsip dasar bagi perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dalam operasi mereka, termasuk perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas. Prinsip-prinsip ini menekankan perlunya perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang memastikan bahwa mereka tidak menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui aktivitas mereka.

Di samping regulasi internasional, setiap negara penghasil minyak dan gas bumi memiliki aturan yang berlaku di dalam negeri. Kerangka hukum ini sering kali mencerminkan karakteristik spesifik dari negara tersebut, termasuk struktur politik, kondisi sosial-ekonomi, serta prioritas nasional dalam pengelolaan sumber daya alam.

- Norwegia: Pengelolaan Minyak yang Bijaksana

Norwegia adalah salah satu negara yang dianggap memiliki model terbaik dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi. Negara ini mengatur sektor ini melalui Petroleum Act yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1996, yang memberikan kerangka hukum untuk eksplorasi dan produksi minyak serta gas

di lepas pantai Norwegia. Selain itu, Norwegia juga memiliki Government Pension Fund Global, yang menggunakan pendapatan dari sektor minyak untuk membiayai berbagai program pembangunan sosial dan infrastruktur di masa depan. Model Norwegia ini banyak dipuji karena memadukan pengelolaan yang transparan dengan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

- Arab Saudi: Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Negara

Di Arab Saudi, sektor minyak dan gas dikelola sepenuhnya oleh perusahaan negara, Saudi Aramco. Perusahaan ini mengontrol mayoritas sumber daya energi di negara tersebut dan bertanggung jawab atas eksplorasi, produksi, serta distribusi minyak dan gas. Di bawah Royal Decree No. M/1 of 1933, Arab Saudi memberikan hak eksklusif kepada perusahaan negara untuk mengelola sektor minyak dan gas. Selain itu, kebijakan negara ini juga mencakup pengelolaan pendapatan dari minyak yang difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program sosial.

- Indonesia: Kerangka Hukum untuk Industri Hulu Minyak dan Gas

Di Indonesia, sektor minyak dan gas dikelola oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban negara, perusahaan, serta masyarakat terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. Di Indonesia, pengelolaan sektor minyak dan gas juga memerlukan transparansi, dan ada upaya untuk memastikan bahwa pendapatan dari sektor ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU).

Selain mengatur aspek keuangan dan ekonomi, regulasi dalam sektor minyak dan gas juga mencakup perlindungan terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat yang terdampak. Pengelolaan yang baik dalam hal ini akan memastikan bahwa sektor minyak dan gas tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

- Environmental Impact Assessment (EIA)

EIA adalah proses yang diwajibkan oleh banyak negara untuk menilai dampak lingkungan dari proyek-proyek besar, termasuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Dalam banyak kasus, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan EIA yang rinci sebelum izin eksplorasi atau produksi diberikan. Laporan ini harus mencakup analisis tentang bagaimana proyek tersebut dapat memengaruhi ekosistem, kualitas udara dan air, serta dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Regulasi ini bertujuan untuk meminimalkan kerusakan

lingkungan dan sosial yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas industri minyak dan gas.

- International Standards on Environmental Management

Standar internasional, seperti ISO 14001 dan ISO 26000, menyediakan pedoman bagi perusahaan minyak dan gas untuk mengelola dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. ISO 14001 memberikan kerangka kerja untuk sistem manajemen lingkungan, sedangkan ISO 26000 memberikan pedoman mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Implementasi standar ini diharapkan dapat meminimalkan polusi, mengurangi jejak karbon, dan meningkatkan efisiensi energi.

Pengelolaan sektor minyak dan gas yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya alam dan memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan digunakan secara bijaksana untuk kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan dan undang-undang yang terkait dengan transparansi dalam sektor ini mencakup:

- Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

EITI adalah kebijakan internasional yang mendorong transparansi aliran pendapatan dari sektor ekstraktif. Negara-negara yang berpartisipasi dalam EITI diwajibkan untuk mempublikasikan laporan tentang pendapatan yang diterima dari sektor ekstraktif dan memastikan bahwa laporan tersebut dapat

diakses oleh publik. Inisiatif ini bertujuan untuk meminimalkan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas sektor ekstraktif.

- Freedom of Information Act (FOIA)

FOIA di beberapa negara memberikan akses publik terhadap informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah, termasuk aliran pendapatan dari sektor minyak dan gas. Dengan kebijakan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang relevan tentang bagaimana pendapatan negara dari sektor ekstraktif digunakan dan bagaimana keputusan-keputusan terkait sumber daya alam diambil.

Akuntabilitas dalam sektor minyak dan gas mengharuskan perusahaan-perusahaan dan pemerintah untuk bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya alam yang mereka kelola. Beberapa kebijakan yang mendukung akuntabilitas ini meliputi:

- Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

FCPA adalah undang-undang AS yang melarang perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar saham AS untuk terlibat dalam praktik suap dan korupsi dalam transaksi bisnis internasional, termasuk di sektor minyak dan gas. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktik korupsi di sektor ekstraktif.

- OECD Guidelines for Multinational Enterprises

Pedoman OECD ini memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh perusahaan multinasional, termasuk perusahaan minyak dan gas, dalam menjalankan operasional mereka secara etis dan bertanggung jawab. Pedoman ini menekankan perlunya perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka.

Kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur sektor minyak dan gas bumi sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan akuntabel. Regulasi internasional seperti EITI dan pedoman dari lembaga-lembaga internasional lainnya, serta kebijakan nasional yang diberlakukan oleh negara-negara penghasil minyak, memberikan landasan yang kuat bagi pengelolaan sektor ini. Keberhasilan implementasi kebijakan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor minyak dan gas dapat mengurangi korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa pendapatan dari sektor ekstraktif digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Bab 3

Profil Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro: Tantangan dan Peluang untuk Pembangunan Berkelanjutan

Industri ekstraktif, khususnya sektor minyak dan gas bumi, memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Di banyak wilayah Indonesia, industri ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Salah satu daerah yang dikenal dengan potensi besar di sektor minyak dan gas bumi adalah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki cadangan minyak yang cukup signifikan, yang telah dikelola melalui kerjasama antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar di industri minyak dan gas bumi.

Dalam analisis ini, kita akan mengulas profil industri ekstraktif minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro, menelusuri peran sektor ini dalam perekonomian daerah, tantangan yang dihadapi, serta kebijakan dan regulasi yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam tersebut. Untuk memberikan perspektif yang lebih dalam, analisis ini akan mengacu pada berbagai referensi dari buku dan jurnal internasional dalam 10 tahun terakhir.

Bojonegoro adalah salah satu kabupaten yang dikenal sebagai pusat produksi minyak di Provinsi Jawa Timur. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro, terutama minyak bumi, telah memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan sektor ekonomi lainnya. Eksplorasi dan produksi minyak di Bojonegoro telah dilakukan sejak lama, dengan berbagai perusahaan minyak yang terlibat dalam pengelolaan cadangan minyak di wilayah ini.

Industri minyak dan gas bumi di Bojonegoro bermula sejak ditemukannya cadangan minyak di beberapa wilayah di kabupaten ini. Salah satu lokasi yang paling terkenal adalah Blok Cepu, yang telah menjadi pusat eksplorasi dan produksi minyak di Bojonegoro. Blok Cepu dioperasikan oleh PT. ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama dengan Pertamina. Blok Cepu memiliki potensi cadangan minyak yang sangat besar, menjadikannya sebagai salah satu blok migas strategis di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan besar seperti ExxonMobil dan Pertamina terus melakukan eksplorasi dan peningkatan produksi minyak di daerah ini. Produksi minyak dari Blok Cepu telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Bojonegoro, seperti lapangan pekerjaan dan peningkatan fasilitas publik.

Industri minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro memiliki dampak yang cukup besar terhadap perekonomian lokal. Salah satu dampak utama adalah kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sektor ini juga mendukung sektor-sektor lain seperti perdagangan, konstruksi, dan perhotelan, yang tumbuh pesat seiring dengan perkembangan industri migas. Selain itu, Bojonegoro juga mengalami peningkatan infrastruktur, seperti jalan raya, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, yang sebagian besar dibiayai melalui dana dari sektor migas.

Produksi minyak yang cukup besar di Blok Cepu memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan warga Bojonegoro. Banyak warga lokal yang terlibat langsung dalam berbagai aspek operasi industri minyak, baik dalam pekerjaan konstruksi, operasional lapangan, hingga pekerjaan administratif dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, sektor migas menjadi sumber utama pendapatan dan mata pencaharian bagi masyarakat setempat.

Namun demikian, meskipun sektor ini memberikan keuntungan ekonomi, ada juga tantangan sosial dan ekonomi yang muncul. Kesenjangan sosial sering kali muncul antara mereka yang terlibat langsung dalam industri ini dan masyarakat yang tidak memperoleh manfaat langsung dari sektor migas. Selain itu, ketergantungan pada sektor minyak dan gas bumi dapat berisiko tinggi, karena harga minyak yang fluktuatif dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah.

Di balik manfaat ekonomi yang diberikan oleh sektor minyak dan gas bumi di Bojonegoro, sektor ini juga menimbulkan tantangan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah dampak lingkungan dari kegiatan ekstraksi minyak, seperti polusi udara dan air, serta potensi kerusakan ekosistem sekitar. Pengelolaan limbah industri minyak yang tidak tepat dapat merusak tanah dan sumber daya air, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kehidupan masyarakat setempat.

Bojonegoro, sebagai daerah penghasil minyak, menghadapi tekanan untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam industri migas, termasuk upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak lingkungan lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas industri minyak dan gas di daerah ini.

Pengelolaan sektor minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro diatur oleh berbagai kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Salah satu regulasi yang mengatur sektor ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya alam ini di Indonesia.

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengelola sektor migas, sementara daerah dapat berperan dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayahnya.

Selain itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga memiliki peran penting dalam pengelolaan industri migas di Indonesia, termasuk di Bojonegoro. SKK Migas bertanggung jawab untuk mengawasi eksplorasi dan produksi minyak di Blok Cepu dan daerah lainnya. Salah satu peran penting SKK Migas adalah memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Meskipun sektor minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal, sektor ini menghadapi sejumlah tantangan ke depan. Salah satu tantangan terbesar adalah fluktuasi harga minyak dunia, yang dapat mempengaruhi pendapatan dari sektor ini. Ketergantungan yang tinggi pada sektor migas juga dapat menjadi masalah apabila harga minyak menurun atau terjadi penurunan dalam cadangan minyak yang dapat dieksploitasi.

Selain itu, isu-isu lingkungan dan sosial juga perlu mendapatkan perhatian serius. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus menjadi prioritas agar dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dapat diminimalkan. Inovasi

dalam teknologi energi terbarukan dan diversifikasi ekonomi menjadi langkah yang penting untuk memastikan bahwa Bojonegoro tidak terlalu bergantung pada sektor migas di masa depan.

Industri ekstraktif minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian lokal, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pembangunan infrastruktur. Namun, sektor ini juga membawa tantangan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang harus diatasi dengan kebijakan yang tepat. Pengelolaan sektor migas yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dan regulasi lainnya, memiliki peranan penting dalam menciptakan tata kelola yang baik di sektor ini. Selain itu, tantangan besar terkait dengan fluktuasi harga minyak dan dampak lingkungan harus dihadapi dengan pendekatan yang lebih holistik, termasuk diversifikasi ekonomi dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Seiring berjalannya waktu, Bojonegoro perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor migas dan beralih ke

energi yang lebih berkelanjutan demi masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi masyarakat.

1. Sejarah dan Perkembangan Industri di Bojonegoro

Bojonegoro, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, memiliki peran penting dalam industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi. Sumber daya alam yang kaya telah mengubah Bojonegoro menjadi salah satu pusat produksi minyak terbesar di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, eksplorasi dan produksi minyak di daerah ini telah mengalami berbagai perkembangan yang berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah, kebijakan pemerintah, dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam analisis ini, kami akan mengulas sejarah awal eksplorasi dan produksi minyak serta gas di Bojonegoro, serta bagaimana perkembangan sektor ekstraktif ini memengaruhi ekonomi daerah dan tantangan yang dihadapi dalam beberapa dekade terakhir. Buku dan jurnal internasional yang relevan akan digunakan sebagai rujukan untuk mendalami topik ini lebih dalam.

Eksplorasi minyak di Bojonegoro dimulai pada awal abad ke-20. Pada tahun 1930-an, perusahaan-perusahaan minyak Belanda mulai melakukan eksplorasi di wilayah ini, yang pada akhirnya mengarah pada penemuan cadangan minyak yang cukup besar. Penemuan tersebut membuka peluang bagi pengembangan industri migas di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur.

Penemuan pertama minyak di Bojonegoro terjadi di Blok Cepu, yang terletak di perbatasan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Blok Cepu menjadi titik awal yang menandai dimulainya sejarah panjang industri ekstraktif di Bojonegoro. Eksplorasi awal yang dilakukan oleh Royal Dutch Shell dan Chevron pada tahun 1960-an berbuah penemuan cadangan minyak yang cukup besar, sehingga mendorong kedua perusahaan tersebut untuk mengembangkan fasilitas produksi minyak.

Perusahaan-perusahaan Belanda dan Amerika yang beroperasi di Indonesia saat itu mengelola dan mengembangkan ladang-ladang minyak di Bojonegoro, yang telah memberi kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pada saat itu, Bojonegoro belum sepenuhnya dikenal sebagai daerah penghasil minyak besar, tetapi potensi yang ada sudah mulai menarik perhatian banyak pihak.

Pada tahun 1970-an, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Blok Cepu melakukan peningkatan eksplorasi yang lebih serius. ExxonMobil dan Pertamina mulai menandatangani kontrak-kontrak yang memungkinkan mereka mengelola cadangan minyak yang lebih besar dan lebih efektif. Blok Cepu, yang dioperasikan oleh PT ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama dengan Pertamina, menjadi salah satu proyek migas terbesar di Indonesia.

Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia melalui SKK Migas mengeluarkan kebijakan yang memberikan hak eksplorasi dan produksi minyak di Blok Cepu kepada ExxonMobil dan Pertamina. Di bawah kontrak kerjasama ini, Bojonegoro mulai mengalami peningkatan signifikan dalam produksi minyak, yang berkontribusi pada pendapatan daerah dan negara. Produksi minyak di Blok Cepu menjadi salah satu kontributor utama bagi cadangan minyak Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya eksplorasi dan produksi minyak, Bojonegoro mengalami berbagai perubahan signifikan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Dampak positif yang pertama adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari sektor ekstraktif. Kabupaten Bojonegoro memperoleh dana yang cukup besar dari pajak dan royalti yang berasal dari hasil produksi minyak, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya.

Sektor minyak dan gas bumi di Bojonegoro juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi ribuan penduduk lokal. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak hanya terbatas pada sektor migas, tetapi juga melibatkan sektor-sektor pendukung seperti konstruksi, perdagangan, dan jasa. Pengembangan infrastruktur, seperti perbaikan jalan raya, pembangunan fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan, juga turut didorong oleh pendapatan yang berasal dari sektor migas.

Namun demikian, meskipun sektor migas memberikan keuntungan ekonomi, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Ketimpangan sosial antara mereka yang terlibat langsung dalam industri migas dan yang tidak terlibat menjadi isu penting, serta ketergantungan pada sektor minyak yang rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.

Pada dekade 2000-an, Bojonegoro melihat perkembangan pesat dalam sektor ekstraktif, terutama di sektor minyak dan gas. Pemerintah Indonesia melalui SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berusaha untuk meningkatkan investasi dalam eksplorasi dan produksi migas. Peningkatan produksi minyak di Blok Cepu tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemerintah, tetapi juga membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Bojonegoro melalui program-program CSR yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan migas.

Pada tahun 2011, produksi minyak di Blok Cepu mencapai lebih dari 200.000 barel per hari, menjadikannya salah satu blok migas dengan produksi tertinggi di Indonesia. Peningkatan ini membawa dampak yang sangat positif bagi perekonomian daerah dan nasional. Namun, selain keuntungan, Bojonegoro juga menghadapi tantangan besar, yaitu meningkatnya dampak lingkungan akibat aktivitas industri migas yang lebih intensif.

Meskipun sektor minyak membawa dampak ekonomi yang positif, perkembangan pesat industri ekstraktif di Bojonegoro juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah polusi udara dan pencemaran air yang dihasilkan dari operasi pengeboran dan pengolahan minyak. Pengelolaan limbah yang buruk dan risiko tumpahan minyak mengancam kualitas air dan tanah yang ada di sekitar area produksi.

Dari sisi sosial, meskipun sektor ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, ketimpangan sosial tetap menjadi masalah. Ada kelompok masyarakat yang mendapat manfaat besar dari industri ini, sementara kelompok lain merasa terpinggirkan dan tidak memperoleh keuntungan yang adil dari pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam, termasuk sektor minyak dan gas bumi. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sektor migas. Program-program seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) juga diterapkan untuk memastikan bahwa aliran pendapatan dari sektor migas dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Penerapan regulasi yang lebih ketat terkait dengan dampak lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), telah dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas industri ekstraktif. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait

dengan pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal di tingkat daerah.

Sektor ekstraktif, khususnya minyak dan gas, telah menjadi tulang punggung perekonomian Bojonegoro. Namun, dengan semakin berkurangnya cadangan minyak yang dapat dieksploitasi dan fluktuasi harga minyak yang tidak stabil, Bojonegoro perlu mulai mempertimbangkan diversifikasi ekonomi dan transisi ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Inovasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dapat menjadi alternatif yang menjanjikan bagi Kabupaten Bojonegoro di masa depan.

Pemerintah daerah juga telah mengupayakan program-program yang dapat membantu masyarakat beralih dari ketergantungan pada sektor migas, seperti program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya alam lainnya.

Sejarah dan perkembangan industri ekstraktif minyak dan gas bumi di Bojonegoro menunjukkan bagaimana sektor ini telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pembangunan infrastruktur. Namun, sektor ini juga membawa tantangan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang perlu diatasi dengan kebijakan yang lebih baik dan transparansi yang lebih tinggi.

Melalui kebijakan dan regulasi yang tepat, pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa sektor ekstraktif di Bojonegoro dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan. Sementara itu, penting bagi Bojonegoro untuk memulai langkah-langkah diversifikasi ekonomi, agar tidak terlalu bergantung pada sektor migas dan dapat menghadapi tantangan ekonomi global yang terus berubah.

2. Potensi Sumber Daya Alam di Bojonegoro

Bojonegoro, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, memiliki potensi sumber daya alam yang sangat signifikan, khususnya di sektor ekstraktif minyak dan gas bumi. Keberadaan cadangan minyak dan gas di wilayah ini telah menjadikannya salah satu pusat produksi energi utama di Indonesia. Selain memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia, eksploitasi sumber daya alam di Bojonegoro juga menimbulkan dampak yang kompleks bagi masyarakat lokal, baik positif maupun negatif. Dalam analisis ini, kami akan mengulas potensi sumber daya alam yang ada di Bojonegoro, terutama minyak dan gas bumi, serta dampak dari eksploitasi sektor ekstraktif terhadap ekonomi dan masyarakat lokal di daerah tersebut.

Bojonegoro memiliki cadangan minyak bumi yang cukup besar dan strategis, yang terletak di Blok Cepu. Blok ini merupakan salah satu blok migas terbesar di Indonesia, dengan

cadangan minyak yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro dan Blora, Jawa Tengah. Minyak yang diproduksi di Bojonegoro sebagian besar berasal dari lapangan minyak yang dikelola oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan Pertamina. Pada tahun 2021, produksi minyak di Blok Cepu diperkirakan mencapai lebih dari 200.000 barel per hari, menjadikannya salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia.

Eksplorasi minyak pertama kali dilakukan oleh perusahaan Belanda pada tahun 1930-an, namun perkembangan besar baru terjadi pada dekade 1970-an dan seterusnya. Sejak saat itu, Bojonegoro menjadi salah satu pusat penghasil minyak utama di Indonesia. Potensi cadangan minyak yang masih ada di Blok Cepu diperkirakan cukup besar, dan eksploitasi lebih lanjut diperkirakan dapat berlangsung hingga beberapa dekade mendatang.

Sebagai contoh, cadangan minyak di Bojonegoro diduga memiliki kualitas yang relatif baik, dengan kadar sulfur yang rendah dan konsentrasi gas yang cukup rendah. Hal ini menjadikannya lebih mudah untuk diproduksi dan diolah. Oleh karena itu, Bojonegoro menjadi salah satu daerah yang sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan minyak nasional dan internasional.

Selain minyak bumi, Bojonegoro juga memiliki potensi gas alam yang signifikan. Gas yang ditemukan di daerah ini sebagian besar berada di dekat cadangan minyak, dan sering kali

dieksploitasi bersamaan dengan minyak bumi. Pengelolaan gas alam ini melibatkan pembangunan fasilitas pemrosesan dan distribusi, serta penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mengalirkan gas ke pusat-pusat industri dan pembangkit listrik.

Dalam beberapa tahun terakhir, gas alam di Bojonegoro telah digunakan sebagai bahan baku untuk pembangkit listrik dan industri. Pemerintah Indonesia melalui SKK Migas terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi gas alam yang ada dengan memfokuskan pengembangan infrastruktur gas untuk mendukung sektor energi dalam negeri.

Ketersediaan gas alam yang melimpah juga membuka peluang untuk Bojonegoro menjadi salah satu pusat energi yang penting, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk ekspor ke luar negeri. Namun, seperti halnya dengan eksploitasi minyak, pengelolaan sumber daya gas alam di Bojonegoro menghadapi tantangan yang serupa, terutama terkait dengan dampak lingkungan dan sosial.

Eksploitasi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi, memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi daerah Bojonegoro dan masyarakat lokal. Dampak tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

1. Dampak Ekonomi: Pertumbuhan dan Ketergantungan pada Sektor Ekstraktif

Sektor minyak dan gas bumi menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro. Dengan pendapatan yang diperoleh dari pajak, royalti, dan dana bagi hasil migas, pemerintah daerah Bojonegoro memperoleh sumber daya finansial yang cukup besar. Pendapatan daerah ini telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Bojonegoro menjadi lebih modern dan berkembang berkat sektor migas. Program-program pemerintah yang didanai dari hasil eksploitasi migas telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya adalah peningkatan kualitas pendidikan dan akses kesehatan, yang sejalan dengan aliran dana dari sektor migas.

Namun, ketergantungan yang berlebihan pada sektor ekstraktif ini juga membawa risiko bagi ekonomi daerah. Fluktuasi harga minyak dunia dan berkurangnya cadangan minyak yang dapat dieksploitasi akan mempengaruhi kestabilan ekonomi Bojonegoro. Oleh karena itu, penting bagi Bojonegoro untuk melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor migas, yang rentan terhadap perubahan harga dan pasokan global.

Selain itu, distribusi pendapatan yang tidak merata dari hasil eksploitasi sumber daya alam sering kali menyebabkan ketimpangan sosial. Sebagian besar manfaat dari sumber daya alam ini hanya dinikmati oleh mereka yang terlibat langsung

dalam sektor migas, sementara masyarakat lainnya mungkin tidak merasakan dampak positif yang sama. Oleh karena itu, pemerataan manfaat ekonomi harus menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

2. Dampak Sosial: Masyarakat Lokal dan Kualitas Hidup

Eksploitasi minyak dan gas bumi di Bojonegoro telah membawa dampak sosial yang signifikan, baik positif maupun negatif. Dampak positif yang dapat dilihat adalah peningkatan lapangan pekerjaan. Ribuan tenaga kerja lokal terlibat dalam operasi pengeboran, pengolahan, dan distribusi minyak dan gas. Hal ini menciptakan peluang bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Namun, ada juga dampak negatif yang timbul akibat eksploitasi sektor ekstraktif ini. Salah satunya adalah ketergantungan sosial pada sektor migas. Banyak masyarakat yang hanya mengandalkan pekerjaan di sektor migas dan tidak memiliki keterampilan atau pelatihan untuk sektor lain, sehingga ketergantungan ini dapat menjadi masalah jika sektor migas mengalami penurunan.

Selain itu, dampak sosial lainnya terkait dengan konflik sosial yang sering terjadi antara masyarakat lokal dan perusahaan-perusahaan migas. Ketidakpuasan terkait dengan pembagian keuntungan yang tidak adil, pengelolaan lahan yang tidak

transparan, serta ketidaksetujuan terhadap penggunaan lahan untuk eksploitasi sumber daya alam sering kali memicu ketegangan sosial. Konflik ini dapat memperburuk hubungan antara masyarakat dan perusahaan serta antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

3. Dampak Lingkungan: Polusi dan Kerusakan Ekosistem

Salah satu dampak negatif yang paling mencolok dari eksploitasi sumber daya alam di Bojonegoro adalah dampak terhadap lingkungan. Kegiatan pengeboran dan pengolahan minyak sering kali menyebabkan polusi udara dan pencemaran tanah serta air. Pengelolaan limbah yang buruk dan risiko tumpahan minyak dapat merusak ekosistem yang ada di sekitar area produksi.

Pencemaran udara, seperti emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembakaran minyak, memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim global. Sementara itu, pencemaran tanah dan air dapat merusak kualitas sumber daya alam lainnya yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertani dan memenuhi kebutuhan air bersih. Pemerintah dan perusahaan migas perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Keberlanjutan

Di sisi lain, sektor ekstraktif di Bojonegoro juga memberikan kesempatan untuk memberdayakan masyarakat melalui program-program Corporate Social Responsibility (CSR). Program-program CSR yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan migas, seperti pelatihan keterampilan, penyediaan fasilitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur lokal, memberikan dampak positif terhadap masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat melalui CSR dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan ketimpangan sosial yang ada.

Namun, pemberdayaan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan merata agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua lapisan masyarakat. Diversifikasi sumber daya dan pengembangan ekonomi lokal di luar sektor migas juga perlu didorong agar masyarakat tidak tergantung pada sektor ekstraktif yang rentan terhadap fluktuasi harga.

Potensi sumber daya alam di Bojonegoro, terutama minyak dan gas bumi, memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi daerah dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Namun, eksploitasi yang intensif juga membawa dampak negatif, baik terhadap ekonomi, masyarakat, maupun lingkungan. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor migas dapat menjadi tantangan besar di masa depan jika harga minyak dunia berfluktuasi atau cadangan minyak mulai menipis. Oleh karena itu, penting bagi Bojonegoro untuk melakukan diversifikasi

ekonomi dan mengelola sektor ekstraktif dengan bijaksana untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial di masa depan.

Pemerintah daerah, perusahaan migas, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Kebijakan yang transparan, pengelolaan yang efisien, dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian dari strategi pengelolaan sektor ekstraktif di Bojonegoro. Dengan pendekatan yang tepat, sektor migas dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal dan menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Pemain Utama dalam Sektor Ekstraktif di Bojonegoro

Sektor ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi, merupakan salah satu sektor yang memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, dan Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Eksploitasi minyak dan gas bumi di Bojonegoro melibatkan berbagai pihak, baik perusahaan-perusahaan besar, pemerintah daerah, maupun pemerintah nasional. Pemahaman tentang siapa saja pemain utama yang terlibat dalam sektor ekstraktif di Bojonegoro dan bagaimana peran mereka berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam ini sangat penting untuk mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi lokal, keberlanjutan sosial, dan pengelolaan lingkungan.

Dalam analisis ini, kami akan mengulas tentang perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam sektor ekstraktif di Bojonegoro, serta peran pemerintah daerah dan pemerintah nasional dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi di wilayah ini. Analisis ini akan mencakup peran strategis dari berbagai pemain utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam menjaga keberlanjutan sektor ini.

Bojonegoro memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang sangat signifikan, terutama yang terletak di Blok Cepu, yang menjadi ladang minyak utama di Indonesia. Blok ini melibatkan beberapa perusahaan, baik perusahaan negara (BUMN) maupun perusahaan multinasional, yang memiliki peran kunci dalam eksplorasi, produksi, dan distribusi energi. Beberapa perusahaan yang terlibat dalam sektor ekstraktif di Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. ExxonMobil Cepu Limited (EMCL)

ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) merupakan salah satu perusahaan utama yang terlibat dalam pengelolaan Blok Cepu di Bojonegoro. Perusahaan ini mengelola sebagian besar produksi minyak dan gas di wilayah Bojonegoro melalui kerja sama dengan Pertamina. ExxonMobil pertama kali memasuki wilayah Blok Cepu pada tahun 2001, dan sejak saat itu telah berperan penting dalam eksplorasi dan pengembangan ladang minyak besar yang ada di Bojonegoro.

Sebagai salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, ExxonMobil memiliki teknologi dan kemampuan finansial yang diperlukan untuk melakukan eksplorasi dan produksi dalam skala besar. Perusahaan ini menggunakan teknologi pengeboran dan pemrosesan modern untuk mengekstraksi minyak bumi dari lapangan-lapangan yang ada di Blok Cepu. Pada puncaknya, ExxonMobil mampu memproduksi lebih dari 200.000 barel per hari dari Blok Cepu.

Namun, meskipun keberadaan ExxonMobil membawa banyak manfaat bagi ekonomi Bojonegoro, terutama dalam bentuk pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja, perusahaan ini juga menghadapi tantangan besar terkait dengan isu-isu lingkungan, sosial, dan keberlanjutan. ExxonMobil dan pihak-pihak terkait harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengelola dampak negatif dari eksploitasi minyak, terutama terkait dengan polusi dan ketimpangan sosial yang bisa timbul.

2. Pertamina

Pertamina, perusahaan minyak milik negara Indonesia, juga merupakan pemain utama dalam sektor ekstraktif di Bojonegoro, terutama dalam pengelolaan Blok Cepu. Pertamina terlibat dalam eksplorasi dan produksi minyak di wilayah ini melalui anak perusahaannya Pertamina EP Cepu, yang bekerja sama dengan ExxonMobil.

Sebagai perusahaan negara, Pertamina memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam di Bojonegoro memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat lokal. Selain itu, Pertamina memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi domestik Indonesia dan mendukung stabilitas pasokan energi. Pertamina juga berkomitmen pada prinsip-prinsip keberlanjutan dan telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi dampak negatif dari produksi minyak terhadap lingkungan, misalnya dengan berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang lebih baik.

Selain perannya dalam eksplorasi minyak, Pertamina juga berperan dalam pembangunan infrastruktur energi di Bojonegoro, seperti pipa gas dan terminal penyimpanan energi, yang mendukung distribusi minyak dan gas ke berbagai sektor industri di Indonesia.

3. Schlumberger dan Halliburton

Perusahaan-perusahaan layanan migas internasional seperti Schlumberger dan Halliburton juga terlibat dalam sektor ekstraktif di Bojonegoro. Perusahaan-perusahaan ini menyediakan layanan teknis dan peralatan untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produksi energi berjalan efisien dan aman, serta dalam membantu perusahaan-perusahaan utama

seperti ExxonMobil dan Pertamina dalam mengoptimalkan hasil produksi.

Schlumberger, sebagai perusahaan layanan minyak terbesar di dunia, menyediakan berbagai layanan, mulai dari pengeboran hingga pemrosesan, serta teknologi untuk meminimalkan dampak lingkungan dari produksi energi. Selain itu, Halliburton juga berperan dalam mendukung operasi pengeboran dan pengolahan minyak dan gas di Bojonegoro dengan teknologi canggih yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasi.

4. Perusahaan Lokal dan Subkontraktor

Selain perusahaan besar internasional dan BUMN, sektor ekstraktif di Bojonegoro juga melibatkan sejumlah perusahaan lokal dan subkontraktor yang berperan dalam mendukung operasi produksi minyak dan gas. Perusahaan-perusahaan lokal ini seringkali terlibat dalam penyediaan layanan dan pasokan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina dan ExxonMobil. Mereka memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja lokal dan mendorong perekonomian daerah.

Meskipun kontribusinya terhadap produksi minyak mungkin kecil, perusahaan lokal memiliki dampak sosial yang signifikan. Mereka menciptakan banyak lapangan kerja dan memungkinkan masyarakat setempat untuk terlibat langsung

dalam sektor ekstraktif. Selain itu, perusahaan lokal juga berperan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi daerah dengan menciptakan peluang bisnis di luar sektor migas, seperti di bidang konstruksi, peralatan, dan logistik.

Eksploitasi sumber daya alam di Bojonegoro melibatkan keterlibatan pemerintah daerah dan pemerintah nasional dalam regulasi, pengawasan, dan pembagian keuntungan dari sektor ekstraktif. Peran kedua pemerintah ini sangat penting dalam memastikan bahwa eksploitasi minyak dan gas bumi di Bojonegoro memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat lokal dan negara, serta dapat dilakukan secara berkelanjutan.

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki peran penting dalam mengelola dampak dari kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Sebagai pemerintah lokal, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor ekstraktif dirasakan oleh masyarakat Bojonegoro secara merata. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengelola dana bagi hasil migas yang diterima dari pemerintah pusat dan perusahaan-perusahaan migas.

Pemerintah daerah Bojonegoro juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan eksploitasi minyak dan gas

tidak merusak lingkungan dan sosial di daerah tersebut. Mereka melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan migas untuk memastikan bahwa standar lingkungan dan sosial dipatuhi. Misalnya, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memberikan izin atau menangguhkan operasi perusahaan jika terbukti melanggar peraturan atau menyebabkan kerusakan lingkungan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung sektor ekstraktif, seperti jalan raya, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Pendapatan dari sektor migas yang diterima oleh pemerintah daerah harus digunakan dengan bijaksana untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Pemerintah Nasional

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), memiliki peran sentral dalam mengatur, mengawasi, dan mengelola sektor ekstraktif di Indonesia, termasuk di Bojonegoro. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan regulasi terkait eksploitasi sumber daya alam, serta memastikan bahwa pendapatan dari sektor migas dikelola dengan transparan dan adil.

Pemerintah nasional juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sektor ekstraktif memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, terutama melalui sistem bagi hasil yang adil antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah nasional adalah program Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dan mengurangi potensi korupsi di sektor ekstraktif.

Selain itu, pemerintah pusat juga berperan dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur energi nasional, termasuk pipa gas, terminal, dan pembangkit listrik yang mengandalkan sumber daya energi dari Bojonegoro. Pemerintah juga memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan migas untuk berinvestasi dalam teknologi yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan sektor ekstraktif.

Sektor ekstraktif di Bojonegoro melibatkan berbagai pemain utama, mulai dari perusahaan-perusahaan internasional seperti ExxonMobil, perusahaan negara seperti Pertamina, hingga perusahaan lokal yang mendukung operasional di lapangan. Semua pemain ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sumber daya alam yang ada dan memastikan bahwa eksploitasi minyak dan gas bumi memberikan manfaat bagi ekonomi dan masyarakat lokal.

Namun, peran pemerintah daerah dan pemerintah nasional juga sangat krusial dalam memastikan bahwa sektor ekstraktif dapat berjalan secara berkelanjutan, adil, dan transparan. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan perusahaan, serta pengawasan yang ketat terhadap dampak lingkungan dan sosial, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Bab 4

Praktik Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Ekstraktif: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro

Sektor ekstraktif, yang melibatkan eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, dan batu bara, merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling penting dan sekaligus paling kontroversial. Potensi keuntungan yang sangat besar membuat sektor ini menjadi sumber daya yang sangat bernilai. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara menghadapi masalah besar terkait pengelolaan sumber daya alam tersebut, termasuk praktik korupsi, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi yang merugikan masyarakat lokal. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua konsep yang sangat penting dalam memastikan bahwa sektor ekstraktif dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, negara, dan lingkungan.

Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana praktik transparansi dan akuntabilitas diterapkan di sektor ekstraktif, dengan fokus pada berbagai kebijakan, mekanisme, dan inisiatif yang berupaya mengurangi dampak negatif dan meningkatkan manfaat sektor ekstraktif secara berkelanjutan. Pembahasan ini akan mencakup definisi transparansi dan akuntabilitas, pentingnya kedua konsep ini dalam sektor ekstraktif, serta contoh praktik transparansi dan akuntabilitas di industri ini.

Praktik transparansi dan akuntabilitas di sektor ekstraktif memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sektor ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat. Meskipun tantangan besar masih ada, berbagai inisiatif dan kebijakan, seperti EITI dan regulasi nasional tentang transparansi, telah menunjukkan bahwa langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dapat mengurangi potensi penyalahgunaan sumber daya alam, meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, serta memastikan bahwa sektor ekstraktif dapat berkembang secara berkelanjutan.

Ke depan, penting bagi negara-negara yang bergantung pada sektor ekstraktif untuk terus memperkuat kerangka hukum dan kebijakan terkait transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam mengawasi dan mengelola sumber daya alam. Dengan begitu, sektor ekstraktif dapat benar-benar menjadi pendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1. Transparansi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (SDA) merupakan aset penting bagi banyak negara di dunia, terutama negara-negara yang bergantung pada sektor ekstraktif seperti minyak, gas, dan mineral. Meskipun sektor ini menawarkan potensi ekonomi yang besar, pengelolaannya sering kali terhambat oleh masalah korupsi, ketidakadilan distribusi manfaat, dan kerusakan

lingkungan. Untuk itu, transparansi dalam pengelolaan SDA menjadi kunci untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dapat membawa manfaat yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Transparansi dalam konteks pengelolaan SDA dapat mencakup berbagai aspek, seperti sistem pelaporan yang terbuka mengenai pendapatan dan hasil eksploitasi, keterbukaan informasi terkait kontrak dan perjanjian yang dibuat antara pemerintah dan perusahaan, serta mekanisme pengawasan yang jelas dan efektif terhadap penggunaan dana yang dihasilkan. Praktik transparansi ini tidak hanya membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Dalam bagian ini, kita akan membahas pentingnya transparansi dalam pengelolaan SDA, sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diakses masyarakat, serta mekanisme pengawasan terhadap dana dan hasil eksploitasi. Pembahasan ini akan merujuk pada berbagai buku dan jurnal internasional terkini, dengan tujuan memberikan analisis yang mendalam tentang bagaimana transparansi dapat diterapkan dan apa dampaknya bagi pengelolaan SDA yang lebih baik.

Sistem pelaporan yang terbuka adalah salah satu pilar utama dalam praktik transparansi di sektor pengelolaan SDA.

Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kegiatan ekstraktif yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan, termasuk pendapatan yang dihasilkan dari eksploitasi SDA, bagaimana pendapatan tersebut dibagi, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menurut Rosser (2014), dalam bukunya *The Political Economy of the Resource Curse*, keterbukaan pelaporan adalah mekanisme yang dapat mengurangi potensi konflik sosial dan ekonomi yang sering muncul dalam masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Tanpa sistem pelaporan yang terbuka, masyarakat tidak dapat mengawasi atau mengevaluasi apakah eksploitasi SDA yang terjadi menguntungkan mereka atau hanya menguntungkan segelintir pihak tertentu, seperti elit politik dan perusahaan besar.

Sistem pelaporan yang terbuka dapat mencakup beberapa komponen utama, antara lain:

- Pendapatan Negara: Informasi tentang pendapatan yang diperoleh negara dari eksploitasi SDA, baik dalam bentuk pajak, royalti, atau bagi hasil, harus dilaporkan secara terbuka. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui apakah pendapatan dari SDA digunakan untuk kepentingan publik atau apakah terjadi kebocoran dana.

- Kontrak dan Perjanjian: Kontrak antara pemerintah dan perusahaan ekstraktif harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Ini termasuk informasi mengenai syarat dan ketentuan yang mengatur eksploitasi SDA, seperti kewajiban perusahaan dalam menjaga lingkungan, membayar pajak, dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
- Kegiatan Ekstraktif: Perusahaan ekstraktif juga harus melaporkan kegiatan mereka secara rinci, termasuk lokasi pengeboran, metode eksploitasi yang digunakan, serta potensi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan tersebut.

Beberapa negara telah berhasil menerapkan sistem pelaporan terbuka dalam pengelolaan SDA. Salah satu contoh yang terkenal adalah Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam sektor ekstraktif dengan mewajibkan perusahaan dan pemerintah untuk mempublikasikan informasi terkait pendapatan yang dihasilkan dari eksploitasi SDA. Negara yang menjadi anggota EITI diharuskan untuk melaporkan informasi yang lengkap tentang pendapatan negara, kontrak yang ada, dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan ekonomi. Negara-negara seperti Indonesia, Ghana, dan Nigeria telah mengimplementasikan standar EITI untuk meningkatkan transparansi sektor ekstraktif mereka.

EITI menjadi contoh penting karena meningkatkan transparansi dalam pengelolaan SDA dapat meminimalkan ketidakadilan dalam pembagian hasil, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Negara-negara yang menerapkan EITI juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor ekstraktif, yang dapat mengurangi potensi ketegangan sosial dan konflik yang sering terjadi di negara-negara penghasil minyak dan gas.

Meskipun sistem pelaporan terbuka sangat penting, implementasinya seringkali menemui berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya manusia untuk memproses dan menyajikan informasi yang relevan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh publik. Di beberapa negara berkembang, keterbatasan infrastruktur teknologi dan kelembagaan dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan transparansi.

Selain itu, dalam beberapa kasus, perusahaan besar yang terlibat dalam eksploitasi SDA enggan untuk membuka informasi terkait kontrak dan keuangan mereka karena alasan persaingan dan keuntungan bisnis. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memperkuat regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara terbuka, serta menyediakan mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut.

Pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana hasil eksploitasi SDA adalah komponen kunci dalam memastikan bahwa sektor ekstraktif benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko besar bahwa pendapatan dari SDA akan disalahgunakan, baik melalui praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun alokasi dana yang tidak efisien.

Menurut Arezki et al. (2019) dalam artikel mereka *The Resource Curse Revisited*, salah satu penyebab utama dari ketimpangan ekonomi dan sosial di negara-negara penghasil SDA adalah kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana yang dihasilkan dari sektor ekstraktif. Ketika pendapatan dari SDA tidak dipantau dengan ketat, mereka cenderung disalurkan ke dalam proyek-proyek yang tidak produktif atau digunakan untuk kepentingan pribadi oleh elit politik dan perusahaan besar.

Mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel dapat mencakup beberapa elemen berikut:

- Auditing Independen: Penggunaan auditor independen untuk memeriksa penggunaan dana hasil eksploitasi dapat memastikan bahwa pendapatan tersebut digunakan dengan efisien dan tepat sasaran. Auditor independen dapat memberikan laporan yang objektif mengenai penggunaan dana, termasuk bagaimana dana tersebut

dibelanjakan dan apakah ada penyalahgunaan atau kebocoran.

- Komite Pengawas Publik: Pembentukan lembaga pengawas yang terdiri dari perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dan pihak terkait lainnya dapat membantu dalam memantau pengelolaan sumber daya alam. Komite ini dapat berfungsi sebagai wadah untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah dan perusahaan mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA.
- Partisipasi Publik dalam Pengawasan: Melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana SDA melalui platform berbasis digital atau forum diskusi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi digital, seperti aplikasi pelaporan berbasis smartphone, dapat digunakan untuk memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan penyalahgunaan atau ketidakwajaran dalam pengelolaan SDA.

Salah satu contoh keberhasilan pengawasan terhadap dana SDA adalah Norwegia, yang dikenal dengan pengelolaan sektor minyak dan gas yang sangat transparan. Negara ini mengembangkan Government Pension Fund Global, yang menyimpan pendapatan dari sektor minyak dan gas untuk masa depan negara. Dana tersebut diawasi dengan ketat oleh lembaga independen, yang melaporkan secara teratur kepada publik tentang bagaimana dana tersebut digunakan.

Selain itu, Chile juga memiliki sistem yang efektif dalam pengawasan dana yang berasal dari eksploitasi tembaga. Pemerintah Chile menggunakan sistem pelaporan yang memungkinkan masyarakat untuk memantau bagaimana pendapatan dari tembaga dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan sosial dan infrastruktur.

Meskipun berbagai mekanisme pengawasan dapat diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam pengawasan dana hasil eksploitasi SDA adalah resistensi dari pihak yang terlibat dalam eksploitasi, baik itu pemerintah maupun perusahaan. Dalam banyak kasus, pihak-pihak ini dapat berusaha untuk menghindari pengawasan dengan berbagai cara, seperti dengan menyembunyikan informasi atau menggunakan celah hukum.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem hukum dan memberikan perlindungan kepada lembaga pengawas agar mereka dapat bekerja dengan bebas dan tanpa tekanan. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana SDA, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan elemen yang sangat penting dalam memastikan bahwa sektor ekstraktif dapat memberikan manfaat yang

maksimal bagi negara dan masyarakat. Sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, bersama dengan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap dana hasil eksploitasi, adalah kunci untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang lebih adil, akuntabel, dan berkelanjutan.

Implementasi transparansi dalam pengelolaan SDA memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, contoh-contoh keberhasilan yang ada menunjukkan bahwa transparansi bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Negara-negara yang bergantung pada sektor ekstraktif harus terus berupaya untuk memperkuat sistem pelaporan terbuka dan mekanisme pengawasan guna menghindari penyalahgunaan sumber daya alam dan memastikan bahwa hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Industri Ekstraktif

Industri ekstraktif, yang mencakup sektor minyak, gas, dan mineral, memegang peran kunci dalam ekonomi banyak negara, terutama negara-negara penghasil sumber daya alam. Meskipun sektor ini berpotensi menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara, pengelolaannya sering kali memunculkan tantangan besar, terutama terkait dengan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya alam yang diperoleh. Akuntabilitas dalam sektor ekstraktif mencakup pertanggungjawaban yang harus diberikan

oleh perusahaan kepada pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya. Akuntabilitas ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan bijaksana, tetapi juga untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam pembagian hasil eksploitasi.

Proses akuntabilitas yang jelas, baik dari perusahaan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat, sangat penting untuk mendorong transparansi, kepercayaan publik, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sektor ekstraktif, perusahaan harus secara teratur melaporkan kegiatan mereka, memberikan informasi yang cukup kepada pemerintah dan masyarakat, serta tunduk pada pengawasan eksternal yang dapat memastikan bahwa kebijakan dan regulasi diikuti dengan baik.

Analisis ini akan membahas dua aspek utama dari akuntabilitas dalam pengelolaan industri ekstraktif: pertama, proses akuntabilitas dari perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat, dan kedua, pengawasan publik serta peran lembaga independen dalam memastikan akuntabilitas. Pembahasan ini akan merujuk pada berbagai literatur terbaru dalam buku dan jurnal internasional yang mengkaji praktik akuntabilitas dalam industri ekstraktif.

Akuntabilitas perusahaan dalam sektor ekstraktif mengacu pada kewajiban perusahaan untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas yang dilakukan terkait dengan eksploitasi sumber

daya alam. Ini mencakup kewajiban perusahaan untuk memberikan laporan yang jelas mengenai pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekstraktif, pengelolaan dampak lingkungan, serta kontribusi sosial yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Akuntabilitas ini memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga beroperasi sesuai dengan norma sosial dan lingkungan yang berlaku.

Menurut Lederman dan Maloney (2012) dalam buku mereka *Natural Resources and Economic Development*, perusahaan yang bergerak dalam industri ekstraktif harus memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang mereka kelola dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat. Akuntabilitas ini dapat dilihat dalam berbagai aspek, antara lain:

- Pelaporan Keuangan: Perusahaan ekstraktif harus secara transparan melaporkan pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam, serta bagaimana pendapatan tersebut dibagi antara perusahaan dan negara.
- Kepatuhan Terhadap Regulasi Lingkungan: Perusahaan juga wajib melaporkan dampak lingkungan dari kegiatan eksploitasi yang mereka lakukan dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut.

- Partisipasi Sosial: Akuntabilitas juga mencakup bagaimana perusahaan berinteraksi dengan masyarakat lokal dan memastikan bahwa mereka memberikan kontribusi positif, baik dalam bentuk lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, maupun program sosial lainnya.

Salah satu bentuk utama dari akuntabilitas adalah pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari eksploitasi SDA. Pendapatan tersebut harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk keuntungan segelintir pihak. Untuk itu, perusahaan harus melaporkan secara rinci bagaimana pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif digunakan oleh pemerintah, serta kontribusi yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk pajak, royalti, atau bagi hasil.

Buku Ross (2015) *The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations* menyoroti bahwa banyak negara yang kaya sumber daya alam, seperti minyak dan gas, sering kali mengalami "kutukan sumber daya," di mana ketergantungan pada pendapatan dari ekstraksi SDA justru memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan menciptakan ketegangan sosial. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan SDA sangat penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial yang lebih besar.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, pemerintah dan perusahaan dapat bekerja sama untuk:

- Melibatkan Masyarakat dalam Pengelolaan: Masyarakat perlu diberi ruang untuk mengetahui dan mengontrol bagaimana pendapatan dari sektor ekstraktif digunakan, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari hasil eksploitasi.
- Menggunakan Platform Digital: Teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan akses informasi terkait pendapatan dan penggunaan dana hasil eksploitasi SDA.

Salah satu tantangan terbesar dalam proses akuntabilitas perusahaan di sektor ekstraktif adalah kurangnya transparansi dan ketidakjelasan dalam laporan keuangan perusahaan. Seringkali, perusahaan besar menghindari pengungkapan informasi yang dapat merugikan mereka secara finansial, misalnya mengenai kewajiban pajak atau pengeluaran yang tidak tercatat dengan baik. Selain itu, korupsi dan kolusi antara pemerintah dan perusahaan sering kali membuat pengelolaan SDA menjadi tidak akuntabel.

Berdasarkan penelitian Shaxson (2018) dalam *Treasure Islands: Uncovering the Damage of Offshore Banking*, banyak perusahaan yang terlibat dalam industri ekstraktif menggunakan sistem offshore untuk menyembunyikan pendapatan mereka, menghindari pajak, dan mengurangi akuntabilitas terhadap negara dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan akuntabilitas, negara perlu memperkuat regulasi mengenai

pelaporan pendapatan dan mengenakan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang terbukti melanggar prinsip transparansi.

Pengawasan publik berperan sebagai mekanisme yang memastikan bahwa perusahaan ekstraktif dan pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam pengelolaan SDA, pengawasan publik dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaporan terkait dampak sosial dan lingkungan, serta pengawasan terhadap penggunaan dana hasil eksploitasi.

Menurut EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), pengawasan publik harus melibatkan aktor-aktor utama dalam masyarakat, seperti lembaga masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah (LSM), dan komunitas lokal yang terpengaruh langsung oleh kegiatan ekstraktif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dengan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam setiap tahap pengelolaan SDA.

Pengawasan publik juga dapat dilakukan melalui media massa dan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan atau ketidakwajaran dalam kegiatan ekstraktif. Di banyak negara, masyarakat telah menggunakan media sosial untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari perusahaan ekstraktif yang beroperasi di wilayah mereka.

Selain pengawasan oleh masyarakat, lembaga independen juga memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas di sektor ekstraktif. Lembaga-lembaga ini, yang dapat berupa audit eksternal, pengawas negara, atau badan regulasi independen, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang ada.

Berdasarkan Pratley dan Goudie (2016) dalam artikel *The Role of Independent Oversight in the Extractive Industries*, lembaga independen dapat memberikan pengawasan yang objektif dan bebas dari pengaruh politik atau kepentingan bisnis. Lembaga ini dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan, memeriksa kepatuhan terhadap standar lingkungan, dan mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Contoh lembaga independen yang memainkan peran besar dalam pengawasan sektor ekstraktif adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan National Audit Office (NAO) di Inggris. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak ada yang terlewatkan dari pengawasan publik.

Meskipun pengawasan publik dan lembaga independen sangat penting untuk akuntabilitas, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya adalah akses terbatas terhadap informasi. Banyak perusahaan ekstraktif tidak

ingin memberikan akses penuh kepada publik mengenai kegiatan mereka, yang menyulitkan lembaga pengawas untuk melakukan tugas mereka secara efektif. Selain itu, lembaga independen di beberapa negara sering kali memiliki keterbatasan dalam sumber daya atau kekuasaan hukum untuk memaksakan perubahan.

Selain itu, korupsi dalam lembaga pengawas atau ketidakmampuan lembaga untuk bertindak secara independen dapat merusak kredibilitas sistem pengawasan itu sendiri. Dalam beberapa kasus, lembaga pengawas mungkin terlibat dalam praktik kolusi dengan perusahaan ekstraktif atau pemerintah, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak efektif.

Untuk itu, penting bagi negara untuk memperkuat kapasitas lembaga pengawas dan memastikan bahwa mereka memiliki otoritas penuh untuk melakukan audit dan investigasi. Selain itu, perlu adanya perlindungan hukum yang kuat bagi whistleblower yang melaporkan penyalahgunaan atau ketidakwajaran dalam industri ekstraktif.

Akuntabilitas dalam pengelolaan industri ekstraktif merupakan elemen yang sangat penting untuk menciptakan sektor yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Proses akuntabilitas yang baik tidak hanya bergantung pada perusahaan untuk melaporkan aktivitas mereka kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga pada pengawasan yang dilakukan oleh publik dan lembaga independen. Pengawasan publik dan peran

lembaga independen sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan bertindak dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta untuk mencegah terjadinya praktik korupsi atau penyalahgunaan sumber daya alam.

Meskipun tantangan besar masih ada, seperti kurangnya transparansi, korupsi, dan akses terbatas terhadap informasi, penting untuk terus memperkuat sistem akuntabilitas melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Negara yang bergantung pada sektor ekstraktif harus memastikan bahwa mereka memiliki mekanisme pengawasan yang efektif, baik itu dari dalam maupun luar negeri, untuk memastikan bahwa sektor ini memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Studi Kasus: Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas di Daerah Lain

Sektor ekstraktif, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral, menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam perekonomian banyak negara. Namun, pengelolaan yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat mengarah pada ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketidakstabilan ekonomi. Banyak negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah malah menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan sumber daya tersebut, bahkan terjebak dalam apa yang dikenal sebagai “resource curse” atau kutukan sumber daya.

Di sisi lain, beberapa daerah dan negara telah berhasil mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif, yang membuktikan bahwa pengelolaan yang baik bisa mengarah pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam bab ini, kita akan membahas beberapa studi kasus dari daerah-daerah yang telah berhasil menerapkan transparansi dan akuntabilitas, serta apa yang bisa dipelajari dari keberhasilan mereka.

Studi Kasus: Norwegia – Model Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Ekstraktif

Norwegia merupakan salah satu negara yang paling sukses dalam mengelola sumber daya alamnya, terutama minyak dan gas bumi. Sejak penemuan minyak di Laut Utara pada tahun 1969, negara ini telah berhasil mengelola kekayaan alamnya dengan prinsip transparansi yang tinggi dan akuntabilitas yang jelas. Negara ini telah menjadi contoh internasional dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pada tahun 1990-an, Norwegia mengembangkan Government Pension Fund Global (GPFG), yang lebih dikenal sebagai Oil Fund, untuk mengelola pendapatan yang diperoleh dari industri minyak dan gas. Tujuan utama dari dana ini adalah untuk mengamankan hasil eksploitasi sumber daya alam untuk generasi mendatang dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan publik. Dana ini tidak hanya

dilaporkan secara terbuka, tetapi juga diawasi oleh publik melalui sistem yang transparan.

Pemerintah Norwegia juga memastikan bahwa seluruh transaksi dan pendapatan yang diperoleh dari sektor ekstraktif diumumkan secara terbuka. Misalnya, Norsk Hydro, salah satu perusahaan energi terbesar di Norwegia, memiliki kebijakan keterbukaan yang tinggi dan secara teratur merilis laporan keberlanjutan yang mencakup dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka.

Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari Norwegia antara lain:

- Pengelolaan yang Berkelanjutan: Dana pensiun global yang dikelola dengan transparansi tinggi menunjukkan bagaimana pengelolaan pendapatan dari sumber daya alam dapat digunakan untuk kepentingan publik dalam jangka panjang.
- Transparansi dalam Pelaporan: Pelaporan yang transparan dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif di Norwegia memberikan contoh terbaik bagaimana pemerintah dan perusahaan dapat bekerja sama dalam memastikan hasil eksploitasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- Pengawasan Independen: Negara ini juga memiliki pengawasan independen yang kuat, termasuk audit dari lembaga internasional, untuk memastikan bahwa semua

kebijakan dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian Hebb (2016) dalam *Sustainability and the Oil Fund: Lessons from Norway*, pengelolaan sumber daya alam di Norwegia telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor ekstraktif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi negara.

Studi Kasus: Brasil – Menghadapi Tantangan dengan Transparansi di Sektor Minyak dan Gas

Brasil, sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, telah mengalami berbagai tantangan terkait dengan pengelolaan sumber daya alamnya. Meskipun memiliki potensi yang besar, Brasil menghadapi isu-isu besar terkait dengan korupsi dan pengelolaan yang tidak transparan dalam sektor ekstraktif. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah mengambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor minyak dan gas.

Pada tahun 2010, Brasil bergabung dengan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), sebuah inisiatif internasional yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam sektor ekstraktif. Dengan bergabung dalam EITI, Brasil berkomitmen untuk melaporkan pendapatan dari sektor

ekstraktif secara terbuka dan memberikan informasi yang jelas mengenai aliran pendapatan dari eksploitasi minyak dan gas.

Selain itu, Brasil juga mengimplementasikan kebijakan regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan minyak dan gas dalam hal pelaporan finansial dan dampak sosial-ekologis. Salah satu langkah penting adalah penetapan Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP) yang berfungsi sebagai lembaga pengawas independen yang dapat mengevaluasi kinerja perusahaan-perusahaan besar di sektor ekstraktif.

Beberapa pembelajaran yang bisa diambil dari Brasil adalah:

- Keterlibatan dalam EITI: Bergabung dengan EITI memberikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dan memperkuat hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil.
- Regulasi yang Lebih Ketat: Dengan memberlakukan regulasi yang lebih ketat, Brasil telah mendorong perusahaan-perusahaan ekstraktif untuk lebih transparan dalam laporan keuangan dan dampak lingkungan.
- Pemberantasan Korupsi: Langkah-langkah untuk memberantas korupsi, seperti melalui audit eksternal dan pengawasan independen, sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif.

Referensi dari Jensen et al. (2014) dalam *Brazil's Transparency and Governance Reform* menunjukkan bagaimana Brasil mulai memperbaiki pengelolaan sektor ekstraktif dengan reformasi transparansi yang lebih baik.

Studi Kasus: Ghana – Meningkatkan Akuntabilitas dengan Menggunakan Teknologi

Ghana adalah salah satu negara di Afrika yang telah berhasil mengelola kekayaan sumber daya alamnya, terutama emas dan minyak. Namun, negara ini sebelumnya menghadapi masalah serius terkait dengan pengelolaan pendapatan dari sektor ekstraktif yang tidak transparan dan rentan terhadap korupsi. Seiring waktu, Ghana mulai memperkenalkan langkah-langkah untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ghana memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi di sektor ekstraktif. Platform Open Data yang diperkenalkan oleh pemerintah memungkinkan masyarakat untuk mengakses data terkait pendapatan yang dihasilkan dari sektor minyak dan gas, serta bagaimana dana tersebut digunakan oleh pemerintah. Selain itu, Ghana juga memperkenalkan Sistem Pelaporan Keuangan Terintegrasi yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap pendapatan dari sektor ekstraktif.

Beberapa pembelajaran yang bisa diambil dari Ghana antara lain:

- Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan teknologi digital, seperti platform data terbuka dan sistem pelaporan terintegrasi, dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengelolaan sumber daya alam.
- Keterlibatan Masyarakat: Ghana juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap sektor ekstraktif.
- Pelaporan Terbuka: Pemerintah Ghana telah menunjukkan bagaimana pelaporan pendapatan dan penggunaan dana secara terbuka dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Referensi dari Bauer et al. (2018) dalam *Leveraging Technology for Transparency in Ghana's Oil and Gas Sector* menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang kuat untuk memperbaiki transparansi dalam pengelolaan sektor ekstraktif.

Melalui analisis studi kasus di Norwegia, Brasil, dan Ghana, kita dapat melihat berbagai pendekatan yang telah berhasil diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki

tantangan dan solusi yang berbeda, namun ada beberapa prinsip umum yang dapat diambil:

- Transparansi dalam Pelaporan: Semua negara yang berhasil menerapkan transparansi berfokus pada pelaporan yang jelas dan terbuka mengenai pendapatan dan penggunaan dana hasil eksploitasi.
- Pengawasan Independen: Lembaga independen dan audit eksternal memainkan peran kunci dalam memastikan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif.
- Partisipasi Masyarakat: Keberhasilan transparansi juga sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dapat terlibat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan.

Pembelajaran dari negara-negara ini dapat diterapkan di berbagai negara lain yang bergantung pada sektor ekstraktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil.

Bab 5

Tantangan Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas di Industri Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Penemuan dan eksploitasi sumber daya alam tersebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah ini. Namun, sektor ekstraktif, seperti industri minyak dan gas, sering kali menghadapi tantangan besar terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, masalah dan tantangan terkait implementasi transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi isu yang perlu diatasi.

Bab ini akan membahas beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dapat meningkatkan pengelolaan sektor ekstraktif yang lebih berkelanjutan.

1. Tantangan dalam Mendorong Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor ekstraktif, sangat penting untuk memastikan

bahwa kegiatan eksploitasi sumber daya dapat berjalan dengan adil, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, transparansi tidak hanya merujuk pada keterbukaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga kepada pengawasan yang efektif terhadap bagaimana perusahaan dan pemerintah mengelola sumber daya tersebut. Namun, meskipun penting, transparansi di sektor ekstraktif sering kali terhambat oleh berbagai tantangan, baik yang bersifat politik, birokrasi, maupun kurangnya mekanisme pengawasan yang memadai.

Bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan utama dalam mendorong transparansi di sektor ekstraktif, dengan fokus pada hambatan politik dan birokrasi serta kurangnya mekanisme pengawasan yang memadai. Analisis ini akan didasarkan pada literatur terkini, termasuk jurnal internasional dan buku-buku yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir.

Salah satu tantangan utama yang menghalangi transparansi di sektor ekstraktif adalah kepentingan politik yang saling bertabrakan. Sumber daya alam, terutama minyak dan gas, sering kali menjadi pusat perhatian dalam politik lokal dan nasional. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seringkali terlibat dalam permainan politik yang berpotensi menghalangi upaya transparansi. Seperti yang diungkapkan oleh Fisman dan Miguel (2007) dalam buku mereka *Economic Gangsters*, sektor ekstraktif seringkali terkait erat dengan korupsi dan klientelisme

politik, di mana elit politik dan pengusaha terlibat dalam hubungan yang tidak transparan untuk mendapatkan akses ke sumber daya alam dan keuntungan ekonomi.

Korupsi yang terjadi dalam sektor ekstraktif tidak hanya berhubungan dengan penyalahgunaan anggaran, tetapi juga dengan pengaturan kebijakan yang bisa merugikan kepentingan masyarakat. Dalam banyak kasus, pemerintah yang memiliki kepentingan politik dalam sektor ekstraktif cenderung melindungi perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi, menghambat kebijakan yang mempromosikan transparansi, dan menekan upaya-upaya anti-korupsi.

Sebagai contoh, Brazil menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan transparansi di sektor minyak dan gas, karena hubungan dekat antara politikus dan perusahaan-perusahaan energi besar. Jornal do Brasil (2016) mencatat bahwa meskipun ada regulasi yang mempromosikan transparansi, praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik yang bekerja sama dengan perusahaan energi sering kali menggagalkan upaya transparansi tersebut.

Selain pengaruh politik, sektor ekstraktif sering kali menghadapi tantangan dari lobi perusahaan yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan besar di sektor ekstraktif, seperti yang bergerak di bidang minyak dan gas, memiliki kekuatan ekonomi yang besar yang memungkinkan mereka untuk

mempengaruhi pembuatan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan transparansi dan pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Auty (2017) dalam *Natural Resources and Development*, ketergantungan negara-negara pada perusahaan besar ini sering kali menghasilkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Dalam konteks ini, transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi tantangan besar karena lobi perusahaan dapat menutupi data penting atau menghambat pengawasan yang memadai terhadap praktik-praktik mereka. Hal ini menyebabkan kebijakan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, meskipun transparansi seharusnya menjadi mekanisme untuk mengontrol kebijakan yang berisiko.

Di Indonesia, misalnya, beberapa perusahaan besar dalam sektor energi sering beroperasi dengan sangat sedikit pengawasan. Bastian et al. (2019) dalam kajian mereka mengungkapkan bahwa di beberapa daerah yang kaya sumber daya alam, kebijakan yang mendorong transparansi terhambat oleh kekuatan lobi ini, yang berujung pada kegagalan untuk menghasilkan laporan yang jelas dan akurat mengenai pendapatan negara dari sektor ekstraktif.

Salah satu hambatan utama yang menghambat transparansi dalam sektor ekstraktif adalah kelembagaan yang lemah dan fragmentasi administratif di dalam pemerintahan. Banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami masalah

koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam. Dalam banyak kasus, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masing-masing memiliki sistem dan prosedur yang terpisah. Hal ini menyebabkan sulitnya menghasilkan laporan yang konsisten, transparan, dan dapat dipercaya.

Menurut Sundaram (2020) dalam jurnal *Governance and Accountability in Resource Management*, kelembagaan yang terfragmentasi sering kali berujung pada ketidakjelasan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Bahkan, dalam banyak kasus, tidak ada lembaga yang memiliki tanggung jawab yang jelas untuk memantau dan mengawasi sumber daya alam secara keseluruhan.

Kelembagaan yang lemah juga sering berhubungan dengan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Banyak instansi pemerintah yang kekurangan tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana mengelola dan memverifikasi data yang berkaitan dengan sektor ekstraktif. Sebagai contoh, dalam laporan BPK (2020) tentang pengelolaan sektor energi di Indonesia, ditemukan bahwa banyak instansi pemerintah yang terlibat dalam pengawasan sumber daya alam

tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam menggunakan alat teknologi dan sistem informasi untuk mendukung transparansi.

Sistem pengawasan yang tidak terintegrasi adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dalam mendorong transparansi. Meskipun beberapa negara memiliki sistem pengawasan yang terpisah untuk setiap sektor, pengawasan yang lebih luas dan terintegrasi terhadap aliran pendapatan dari sumber daya alam sering kali tidak dilakukan dengan baik. Pemerintah daerah dan pusat perlu memiliki sistem yang lebih terkoordinasi untuk memantau pengeluaran, distribusi pendapatan, serta dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan eksploitasi.

Dalam penelitian oleh Fayos (2018) mengenai mekanisme pengawasan di sektor ekstraktif, ditemukan bahwa meskipun ada banyak badan pengawas, tidak ada satu pun yang memiliki kewenangan untuk secara langsung mengawasi dan mengevaluasi transparansi di sektor ekstraktif secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan yang beroperasi di sektor ini.

Selain kelembagaan dan birokrasi yang lemah, tantangan lain yang menghambat transparansi adalah lambatnya adaptasi terhadap teknologi yang dapat memfasilitasi transparansi dan pengawasan. Penggunaan teknologi informasi seperti sistem pelaporan elektronik, database terbuka, dan platform digital

untuk transparansi sering kali terhambat oleh ketidakmampuan birokrasi dalam mengimplementasikan dan mengelola teknologi tersebut.

Buku oleh Yulianto (2018), *Penerapan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Keuangan Daerah*, mengungkapkan bahwa banyak instansi pemerintah yang belum memanfaatkan potensi teknologi secara maksimal untuk memastikan transparansi keuangan dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif. Misalnya, di Indonesia, meskipun ada inisiatif dari pemerintah pusat seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), penerapannya di tingkat lokal masih sering terbentur oleh masalah kapasitas teknis dan birokrasi yang tidak fleksibel.

Untuk mengatasi hambatan birokrasi, penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pengelolaan sektor ekstraktif sangat penting. Pemerintah daerah perlu menetapkan lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi dan memantau aliran pendapatan dari sektor ekstraktif. Selain itu, membangun sistem pengawasan yang terintegrasi antara berbagai lembaga pemerintahan akan mengurangi fragmentasi administratif dan meningkatkan akuntabilitas.

Penggunaan teknologi digital yang lebih baik untuk pelaporan keuangan dan pengelolaan data sangat dibutuhkan untuk memperbaiki transparansi. Pemerintah daerah perlu mengembangkan platform pelaporan yang terbuka, seperti yang

dilakukan oleh negara-negara yang telah berhasil menerapkan sistem transparansi ekstraktif, misalnya melalui EITI (Extractive Industries Transparency Initiative).

Selain penguatan kelembagaan, kebijakan yang jelas dan kuat dalam melawan korupsi dan lobi perusahaan juga sangat penting. Pembentukan badan independen yang tidak terpengaruh oleh kekuatan politik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses transparansi dan pengawasan. Stiglitz (2015) dalam bukunya *The Price of Inequality* menekankan pentingnya transparansi dalam sistem politik yang lebih luas untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong reformasi yang efektif.

Transparansi di sektor ekstraktif menghadapi berbagai tantangan yang bersifat politik, birokrasi, dan pengawasan. Hambatan politik dan birokrasi yang lemah sering kali menyebabkan kegagalan dalam mempromosikan transparansi, sementara lobi perusahaan yang kuat dapat memperburuk situasi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kelembagaan dan sistem pengawasan, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan transparansi yang lebih baik di sektor ekstraktif. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan komitmen politik yang kuat dan kebijakan yang mendukung integritas serta akuntabilitas.

2. Tantangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam sektor ekstraktif, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam memberi manfaat yang seimbang bagi masyarakat dan negara. Akuntabilitas mengharuskan adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pihak yang mengelola sumber daya alam, baik itu pemerintah, perusahaan, maupun lembaga terkait lainnya, terhadap masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan utama. Namun, dalam praktiknya, tantangan besar sering muncul dalam meningkatkan akuntabilitas di sektor ini. Bab ini akan membahas beberapa tantangan utama dalam meningkatkan akuntabilitas, khususnya kendala yang dihadapi masyarakat dalam meminta pertanggungjawaban dan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan antara pemerintah dan masyarakat.

Salah satu kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam meminta pertanggungjawaban adalah keterbatasan akses informasi yang relevan mengenai pengelolaan sumber daya alam, terutama yang berkaitan dengan pendapatan negara dari sektor ekstraktif, aliran dana, dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya tersebut. Transparansi dalam hal ini sangat penting, karena tanpa informasi yang jelas dan dapat diakses, masyarakat akan kesulitan dalam mengidentifikasi apakah tindakan pemerintah dan perusahaan telah sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Menurut Bastian et al. (2019) dalam *The State of Transparency in the Extractive Sector*, banyak negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk Indonesia, mengalami kekurangan dalam sistem pelaporan yang memadai. Informasi mengenai keuntungan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif, serta pembagian keuntungan antara pemerintah dan masyarakat, sering kali disembunyikan atau tidak disajikan dengan cara yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Hal ini mempersulit upaya masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban dari perusahaan dan pemerintah.

Di Indonesia, meskipun ada kebijakan seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), pelaksanaan transparansi masih terhambat oleh kesulitan dalam mengakses data yang relevan di tingkat lokal. Sebagai contoh, laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan ekstraktif sering kali disusun dalam format yang sangat teknis dan tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan mengenai bagaimana sumber daya alam dikelola.

Masyarakat sering kali tergantung pada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan ekstraktif yang beroperasi di wilayah mereka. Namun, dalam banyak kasus, ketergantungan ini menjadi masalah, terutama ketika pemerintah tidak cukup independen atau tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut. Keterbatasan

anggaran dan kapasitas kelembagaan sering kali menghalangi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang efektif.

Menurut Harrison et al. (2020) dalam *The Role of Civil Society in Resource Governance*, di banyak negara berkembang, masyarakat lokal sering kali merasa terpinggirkan dalam proses pengawasan sektor ekstraktif, karena pengawasan tersebut dilakukan secara sentralisasi dan tidak melibatkan partisipasi mereka secara langsung. Masyarakat juga menghadapi kesulitan dalam mengakses saluran yang memadai untuk mengajukan keberatan atau melaporkan masalah yang mereka hadapi terkait dengan eksploitasi sumber daya alam.

Selain itu, korupsi yang ada di level pemerintah juga menjadi hambatan besar dalam meningkatkan akuntabilitas. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah yang berhubungan dengan perusahaan ekstraktif bisa menghalangi upaya masyarakat untuk memperoleh pertanggungjawaban yang seharusnya. Global Witness (2018) menyatakan bahwa dalam banyak kasus, pejabat pemerintah yang terlibat dalam sektor ekstraktif sering kali terlindungi oleh jaringan kekuasaan politik, yang membuat proses akuntabilitas menjadi lebih sulit dilakukan.

Masyarakat sering kali merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di daerah mereka. Faktor ini terkait erat dengan masalah keterbatasan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan

pembuatan kebijakan. Menurut Tullock et al. (2019) dalam *Public Choice Theory and the Extractive Sector*, ketimpangan kekuasaan antara perusahaan besar dan masyarakat lokal sering kali membuat kebijakan yang dihasilkan lebih menguntungkan bagi perusahaan dan lebih merugikan masyarakat.

Proses perumusan kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung menyebabkan keputusan yang diambil cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya menjadi penonton dari keputusan yang telah dibuat tanpa adanya kesempatan untuk memberikan masukan atau mempengaruhi arah kebijakan.

Pembagian keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil merupakan tantangan besar dalam meningkatkan akuntabilitas. Meskipun sektor ekstraktif, terutama minyak dan gas, dapat menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara, namun tidak jarang pembagian pendapatan ini tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal. Sebagian besar keuntungan sering kali berakhir di tangan perusahaan-perusahaan besar dan elit politik, sementara masyarakat lokal yang seharusnya mendapatkan dampak positif dari sumber daya alam yang dieksploitasi justru sering kali mengalami kerugian dalam bentuk kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hidup, dan ketidakadilan sosial.

Dalam laporan United Nations Development Programme (UNDP) 2018, disebutkan bahwa di banyak negara dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti Indonesia, sebagian besar pendapatan dari sektor ekstraktif disalurkan ke pemerintah pusat dan perusahaan besar, sementara masyarakat lokal, terutama yang tinggal di sekitar wilayah tambang atau ladang minyak, tidak memperoleh manfaat yang sebanding. Padahal, seharusnya, masyarakat lokal harus memperoleh bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah mereka.

Ketidakadilan dalam pembagian keuntungan ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan yang terlibat. Ross (2017) dalam *The Oil Curse* menjelaskan bahwa ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dari sektor ekstraktif seringkali menumbuhkan ketidakpuasan yang berujung pada ketegangan sosial dan konflik. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan ini seringkali tercermin dalam penghasilan daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang ada di daerah tersebut.

Selain masalah ketimpangan, mekanisme pembagian keuntungan yang tidak transparan juga menjadi tantangan dalam sektor ekstraktif. Dalam banyak kasus, tidak ada sistem yang jelas dan terbuka mengenai bagaimana keuntungan dari sumber daya

alam dibagi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Pembagian yang tidak jelas ini menyebabkan timbulnya ketidakadilan, di mana masyarakat lokal tidak tahu berapa banyak pendapatan yang seharusnya mereka terima atau bagaimana dana tersebut digunakan.

Ali & Ahmad (2016) dalam jurnal mereka yang berjudul *Revenue Management and Public Accountability in Extractive Industries* mengungkapkan bahwa ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan sering kali disebabkan oleh kurangnya regulasi yang jelas yang mengatur bagaimana pendapatan dari sektor ekstraktif harus didistribusikan. Tanpa adanya aturan yang jelas, perusahaan dan pemerintah cenderung mengeksploitasi sistem ini untuk keuntungan mereka sendiri, tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat.

Salah satu cara untuk mengatasi tantangan dalam meminta pertanggungjawaban adalah dengan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengawasan dan pembuatan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus menyediakan saluran yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui platform digital, forum-forum publik, dan mekanisme konsultasi yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pemerintahan.

Penting untuk menciptakan mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan transparan. Pemerintah harus menetapkan standar yang jelas mengenai bagaimana keuntungan dari sektor ekstraktif harus dibagi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat lokal. Salah satu contoh yang bisa diterapkan adalah sistem royalti yang jelas, di mana perusahaan membayar bagian yang adil dari pendapatan mereka kepada pemerintah daerah yang memiliki sumber daya tersebut.

Untuk memastikan bahwa sistem akuntabilitas berfungsi dengan baik, perlu ada penguatan terhadap lembaga pengawasan independen, yang dapat memantau bagaimana pendapatan dari sektor ekstraktif digunakan dan dibagikan. Lembaga-lembaga ini harus memiliki wewenang yang cukup dan dapat bekerja tanpa pengaruh dari pihak-pihak yang terlibat dalam sektor ekstraktif.

Tantangan dalam meningkatkan akuntabilitas sektor ekstraktif di Indonesia dan daerah lainnya terletak pada keterbatasan akses informasi, ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, dan pengawasan yang lemah. Agar sektor ekstraktif dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh pemangku kepentingan, perlu ada reformasi sistemik yang mencakup peningkatan partisipasi publik, transparansi pembagian keuntungan, dan penguatan lembaga pengawasan independen.

3. Dampak Negatif dari Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Sektor ekstraktif, yang mencakup eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, dan mineral, memainkan peran penting dalam perekonomian negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk Indonesia. Meskipun sektor ini memiliki potensi untuk mendorong pembangunan ekonomi, tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang memadai, dampak negatifnya dapat sangat merugikan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Ketika pengelolaan sumber daya alam tidak transparan dan tidak akuntabel, dampak-dampaknya bisa terasa jauh melampaui kerugian finansial dan dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan yang sulit untuk diperbaiki. Bab ini bertujuan untuk mengkaji dampak negatif yang timbul akibat kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif, baik dari perspektif kerugian ekonomi bagi daerah dan masyarakat, maupun dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.

Salah satu dampak yang paling jelas dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif adalah penurunan pendapatan daerah yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam. Ketika perusahaan ekstraktif dan pemerintah tidak transparan dalam melaporkan pendapatan yang dihasilkan, serta tidak akuntabel dalam membagikan hasil eksploitasi tersebut, sebagian besar pendapatan yang seharusnya diterima

oleh pemerintah daerah dan masyarakat bisa berkurang atau bahkan tidak sampai ke mereka. Keuntungan yang diperoleh dari sektor ini cenderung lebih banyak mengalir ke pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pengambil kebijakan atau pengusaha besar, sementara daerah tempat sumber daya alam itu berada tidak mendapatkan manfaat yang sebanding.

Sebagai contoh, di Indonesia, meskipun sektor ekstraktif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, beberapa daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti Kalimantan dan Sumatra, justru tidak merasakan manfaatnya secara maksimal. Penelitian Bastian et al. (2019) dalam *The State of Resource Governance in Indonesia* menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan sering kali terjadi, di mana sebagian besar pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar dari sektor ekstraktif tidak dibagikan secara adil kepada masyarakat lokal atau daerah penghasil. Kurangnya mekanisme pelaporan yang transparan menyebabkan ketidakpastian tentang berapa banyak pendapatan yang harus dibagikan kepada pemerintah daerah, yang akhirnya berdampak pada pembangunan ekonomi lokal.

Pendapatan yang hilang atau tidak maksimal akibat kurangnya transparansi dalam sektor ekstraktif dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Daerah penghasil sumber daya alam seharusnya bisa menggunakan sebagian besar

pendapatan untuk membiayai pembangunan infrastruktur lokal seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tanpa akuntabilitas yang jelas, dana yang seharusnya digunakan untuk tujuan tersebut sering kali disalahgunakan atau hilang tanpa pertanggungjawaban yang memadai.

Pemerintah daerah yang bergantung pada royalti sumber daya alam dan pajak perusahaan dalam pembiayaan pembangunan lokal sering kali tidak memiliki akses atau kontrol yang cukup atas pendapatan tersebut. Tullock et al. (2020) dalam *Public Choice and Resource Wealth* menjelaskan bahwa keterbatasan informasi dan kurangnya mekanisme pengawasan dapat menyebabkan sebagian besar pendapatan yang seharusnya diperoleh daerah penghasil justru dikorupsi atau tidak digunakan secara efisien. Akibatnya, meskipun sektor ekstraktif memiliki potensi besar untuk mendanai pembangunan lokal, masyarakat tetap hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketertinggalan.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam juga dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah yang kaya akan sumber daya alam dan daerah lainnya. Ketika sebagian besar keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam dikuasai oleh perusahaan besar dan elit politik, masyarakat lokal sering kali tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap kesempatan

ekonomi dan pembangunan. Sistem yang tidak adil dalam pembagian keuntungan ini berpotensi menyebabkan polarisasi sosial, di mana sebagian kelompok masyarakat menjadi sangat kaya, sementara sebagian besar lainnya tetap miskin.

Ross (2017) dalam *The Oil Curse* mencatat bahwa ketidakadilan dalam pembagian keuntungan sering kali memperburuk ketimpangan pendapatan di daerah penghasil sumber daya alam. Hal ini bisa menciptakan ketegangan sosial yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial antara masyarakat lokal dan perusahaan atau pemerintah, yang pada akhirnya menghambat kemajuan ekonomi secara keseluruhan.

Ketika transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ekstraktif tidak terjaga, salah satu dampak sosial yang paling signifikan adalah timbulnya konflik sosial. Konflik ini sering kali muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap cara pemerintah dan perusahaan ekstraktif mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan serta ketidakadilan dalam pembagian hasil eksploitasi dapat memicu rasa tidak adil dan frustrasi di kalangan masyarakat.

Harrison et al. (2020) dalam *Social Conflicts and Resource Governance* menyatakan bahwa salah satu penyebab utama konflik sosial di daerah penghasil sumber daya alam adalah ketidaktransparanan dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat lokal sering kali merasa bahwa mereka hanya menjadi

pihak yang dirugikan dalam proses eksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah mereka, sementara keuntungan yang diperoleh tidak mereka rasakan. Ketidakpuasan ini sering kali berkembang menjadi protes atau bahkan konflik terbuka antara masyarakat dan perusahaan atau pemerintah.

Dampak sosial lain dari kurangnya transparansi adalah marginalisasi masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan ekstraktif, seperti tambang minyak dan gas, sering kali tidak dilibatkan dalam keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam mereka. Mereka tidak diberi kesempatan untuk berbicara mengenai bagaimana sumber daya alam mereka dikelola atau bagaimana keuntungan dari eksploitasi tersebut dibagi.

Global Witness (2018) dalam laporan mereka mengenai peningkatan transparansi dalam sektor ekstraktif mencatat bahwa masyarakat lokal sering kali merasa terpinggirkan dan tidak diberdayakan. Mereka tidak diberikan akses yang cukup untuk mengakses informasi tentang bagaimana perusahaan melakukan eksploitasi, berapa banyak keuntungan yang dihasilkan, dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan lokal. Hal ini menyebabkan rasa keterasingan yang mendalam di kalangan masyarakat lokal dan dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ekstraktif sering kali menyebabkan kerusakan

lingkungan yang serius. Dalam banyak kasus, perusahaan ekstraktif yang tidak diawasi dengan ketat oleh pemerintah atau lembaga independen sering kali mengabaikan standar-standar lingkungan yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem yang besar. Penambangan minyak dan gas yang tidak ramah lingkungan, seperti tumpahan minyak, pencemaran udara, dan kerusakan habitat, dapat mengancam keberlanjutan lingkungan di daerah tersebut.

Menurut Harrison et al. (2020), kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif sering kali memungkinkan perusahaan untuk mengabaikan peraturan lingkungan. Misalnya, perusahaan minyak yang tidak transparan mengenai dampak lingkungannya dapat mencemari tanah dan air, merusak habitat flora dan fauna, serta memperburuk perubahan iklim yang mempengaruhi masyarakat lokal. Indonesia, dengan banyaknya proyek ekstraktif, menghadapi tantangan besar terkait dengan kerusakan hutan dan pencemaran laut akibat kurangnya pengawasan yang memadai.

Dampak lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam tidak hanya terbatas pada kerusakan langsung terhadap ekosistem, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, yang dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan, berkontribusi terhadap emisi karbon yang memperburuk pemanasan global. Dampak

perubahan iklim ini sering kali lebih dirasakan oleh masyarakat lokal yang tinggal di sekitar area ekstraktif, yang tergantung pada sumber daya alam alami untuk penghidupan mereka.

Global Environmental Facility (2021) menyebutkan bahwa daerah yang sangat bergantung pada industri ekstraktif sering kali menjadi lebih rentan terhadap perubahan iklim, terutama jika tidak ada upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan ekstraktif.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ekstraktif memiliki dampak negatif yang sangat signifikan terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Kerugian ekonomi yang timbul dari ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, konflik sosial yang muncul akibat marginalisasi masyarakat lokal, serta kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi yang tidak bertanggung jawab merupakan beberapa dampak utama yang harus dihadapi. Untuk mengurangi dampak-dampak negatif ini, penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik di sektor ekstraktif, yang pada gilirannya akan membantu menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan adil.

Bab 6

Langkah Strategis Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Industri Minyak dan Gas

Bojonegoro, sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia, memiliki peran penting dalam perekonomian regional dan nasional. Sumber daya alam ini, meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, sering kali menimbulkan tantangan dalam hal pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Ketidakjelasan dalam pembagian hasil eksploitasi, kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif, serta ketidakikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan sering menjadi penyebab terhambatnya manfaat yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ekstraktif, khususnya dalam hal eksploitasi minyak dan gas bumi di Bojonegoro.

Bab ini akan membahas beberapa strategi dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Bojonegoro, serta dampak positif yang dapat dihasilkan dari penerapan strategi ini.

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Sektor ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi, merupakan salah satu pilar ekonomi di Indonesia, termasuk

Kabupaten Bojonegoro yang kaya akan sumber daya alam ini. Meskipun potensi besar yang dimiliki, sektor ini sering kali menimbulkan tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa manfaat dari eksploitasi sumber daya alam benar-benar dinikmati oleh masyarakat lokal adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Partisipasi masyarakat yang aktif dalam setiap tahap pengambilan keputusan, serta pembentukan forum komunikasi yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, menjadi kunci untuk menciptakan sektor ekstraktif yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, bab ini akan menganalisis pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sektor ekstraktif, khususnya di Kabupaten Bojonegoro, serta memberikan rekomendasi terkait cara-cara yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sektor ekstraktif merujuk pada keterlibatan aktif warga negara, terutama masyarakat yang tinggal di daerah sekitar lokasi eksplorasi dan produksi sumber daya alam, dalam mengawasi dan memonitor kegiatan perusahaan ekstraktif. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti keikutsertaan dalam pembuatan kebijakan, pengawasan langsung, serta pengumpulan dan penyebaran informasi.

Sebagai bagian dari good governance, partisipasi masyarakat memberikan dampak yang signifikan terhadap keputusan yang lebih demokratis, lebih akuntabel, dan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat (Lockwood, 2020). Dalam konteks sektor ekstraktif, partisipasi masyarakat mencakup pengawasan terhadap penggunaan dana bagi hasil, pengelolaan lingkungan, serta keadilan dalam pembagian hasil eksploitasi sumber daya alam.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat penting, terutama dalam sektor ekstraktif yang sering kali melibatkan sumber daya alam yang rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Partisipasi ini tidak hanya memastikan bahwa masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang dapat terjadi dalam industri ini (Schroeder & Broughton, 2021).

Beberapa alasan mengapa partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat penting antara lain:

- Mengurangi Potensi Korupsi: Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengawasan, mereka dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan dana yang dapat merugikan daerah.
- Meningkatkan Akuntabilitas: Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, perusahaan dan

pemerintah akan lebih cenderung untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan mereka kepada publik.

- Memberdayakan Masyarakat Lokal: Partisipasi dalam pengawasan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam keputusan yang mempengaruhi lingkungan mereka, serta memungkinkan mereka untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dari hasil eksploitasi sumber daya alam.

Tahap pertama dalam pengawasan adalah perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Pada tahap ini, masyarakat dapat dilibatkan dalam berbagai cara, seperti melalui musyawarah desa, forum konsultasi, atau pertemuan antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat pada tahap ini penting agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan adalah:

1. Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Pembangunan: Pemerintah daerah perlu mengundang masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan proyek-proyek ekstraktif sejak

awal, dengan memberikan pemahaman tentang potensi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

2. Dialog Terbuka dan Musyawarah: Proses musyawarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan akan menciptakan kesepahaman dan mengurangi konflik antara pihak pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan berkala atau forum konsultasi antara pemangku kepentingan.

Setelah kebijakan dan perencanaan disusun, tahap berikutnya adalah implementasi proyek ekstraktif. Pada tahap ini, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas eksternal yang memantau apakah perusahaan memenuhi kewajibannya terkait dengan dana bagi hasil, pembayaran royalti, serta penanggulangan dampak lingkungan.

Beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam tahap ini adalah:

1. Penyelenggaraan Forum Pengawasan: Pembentukan forum pengawasan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal yang dapat mengevaluasi pelaksanaan proyek, serta memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang ada dipatuhi.

2. Pemantauan Dampak Lingkungan dan Sosial: Masyarakat dapat dilibatkan dalam pemantauan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ekstraktif. Pengawasan ini

bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi sederhana seperti aplikasi pelaporan dampak atau bahkan keterlibatan langsung dalam audit lingkungan yang dilakukan oleh pihak independen.

Evaluasi terhadap proyek yang telah dilaksanakan juga menjadi bagian penting dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pada tahap evaluasi, masyarakat harus diberikan ruang untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan proyek, serta dampaknya terhadap mereka. Partisipasi pada tahap ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk menilai apakah proyek memberikan manfaat, tetapi juga untuk menyarankan perbaikan dalam implementasi proyek ke depannya.

Contoh bentuk partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah:

1. Penyelenggaraan Laporan Tahunan dan Forum Evaluasi: Pemerintah Bojonegoro dan perusahaan ekstraktif harus menyusun laporan tahunan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pendapatan daerah, dampak sosial dan ekonomi, hingga kebijakan lingkungan. Laporan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat melalui forum evaluasi yang melibatkan semua pihak terkait.
2. Survei dan Umpan Balik dari Masyarakat: Survei yang mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana mereka

merasakan dampak dari kegiatan ekstraktif yang berlangsung. Hasil survei ini dapat menjadi acuan untuk keputusan-keputusan kebijakan yang akan datang.

Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif adalah melalui forum komunikasi yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Forum komunikasi ini akan menjadi tempat untuk berbagi informasi mengenai kegiatan ekstraktif yang sedang berlangsung, termasuk hasil eksplorasi, kontribusi terhadap ekonomi daerah, dan dampak sosial serta lingkungan yang ditimbulkan.

Forum komunikasi ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Rapat umum dan dialog publik: Rapat atau dialog terbuka yang diadakan secara berkala, di mana masyarakat dapat mengajukan pertanyaan dan menyampaikan kekhawatiran terkait kegiatan ekstraktif.
- Website dan platform informasi: Pemerintah dan perusahaan dapat membuat website resmi yang memberikan informasi terbaru mengenai proyek-proyek ekstraktif, termasuk data keuangan, dampak sosial dan lingkungan, serta laporan evaluasi.

Dalam forum komunikasi ini, sangat penting untuk melibatkan lembaga independen, baik itu lembaga swadaya

masyarakat (LSM), akademisi, maupun lembaga audit yang memiliki kredibilitas. Lembaga-lembaga independen ini akan memastikan bahwa informasi yang dibagikan adalah objektif dan tidak terdistorsi oleh kepentingan pihak manapun.

Lembaga independen juga dapat berfungsi sebagai mediator yang membantu menyelesaikan konflik yang mungkin timbul antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, serta mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sektor ekstraktif di Bojonegoro antara lain:

1. Mengembangkan Kebijakan yang Mempermudah Partisipasi Masyarakat: Pemerintah Bojonegoro harus merancang kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan proyek ekstraktif. Ini termasuk memberikan pelatihan dan fasilitas yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengakses informasi terkait proyek yang sedang berlangsung.
2. Mendorong Pembentukan Forum Pengawasan yang Inklusif: Forum pengawasan yang melibatkan semua pihak harus dibentuk dan diaktifkan secara berkala. Forum ini

dapat berfungsi sebagai tempat diskusi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat mengenai berbagai isu terkait proyek ekstraktif.

3. Transparansi dalam Penyampaian Informasi: Pemerintah dan perusahaan harus memastikan bahwa informasi terkait proyek ekstraktif disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk meningkatkan aksesibilitas informasi.
4. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pengawasan Independen: Penguatan peran lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi proyek ekstraktif akan sangat penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas sektor ini.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sektor ekstraktif sangat penting untuk memastikan bahwa hasil eksploitasi sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, serta membentuk forum komunikasi yang transparan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan akan tercipta pengelolaan sektor ekstraktif yang lebih akuntabel, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

2. Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memegang peran penting dalam mengatur dan mengawasi aktivitas sektor ekstraktif yang beroperasi di wilayahnya. Regulasi lokal yang kuat dan spesifik dapat menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Strategi untuk penguatan regulasi dan kebijakan lokal:

1. Menerapkan kebijakan berbasis data: Pemerintah daerah perlu mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan sektor ekstraktif, seperti volume produksi, pendapatan, dan dampak lingkungan. Data ini menjadi dasar pembuatan kebijakan yang lebih efektif (Schroeder et al., 2020).
2. Mewajibkan keterbukaan kontrak: Pemerintah daerah dapat membuat regulasi yang mengharuskan publikasi kontrak antara perusahaan dan pemerintah. Ini akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya.
3. Mengintegrasikan kebijakan keberlanjutan: Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap aktivitas ekstraktif harus memenuhi standar keberlanjutan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pengawas eksternal, seperti auditor independen, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau badan pemeriksa negara, untuk memastikan pengawasan yang lebih objektif.

Manfaat kolaborasi dengan lembaga eksternal:

- Audit yang kredibel: Lembaga pengawas eksternal dapat melakukan audit terhadap aktivitas perusahaan ekstraktif, terutama terkait penggunaan dana dan dampak lingkungan.
- Peningkatan akuntabilitas: Kolaborasi ini dapat mengurangi konflik kepentingan yang sering muncul dalam pengawasan internal pemerintah daerah.
- Pendampingan teknis: Lembaga eksternal dapat memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pengawasan mereka.

3. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi

Teknologi digital dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan transparansi dalam sektor ekstraktif. Pemerintah daerah dapat mengembangkan platform digital yang memungkinkan pelaporan dan pemantauan aktivitas ekstraktif secara real-time.

Fitur utama platform digital:

1. Pelaporan Keuangan: Platform ini dapat menyediakan informasi terkait pendapatan, pembayaran royalti, dan dana bagi hasil yang diterima dari perusahaan ekstraktif.
2. Pemantauan Lingkungan: Menggunakan teknologi Internet of Things (IoT), data real-time tentang emisi, kualitas udara, dan kerusakan lingkungan dapat dikumpulkan dan dipublikasikan.
3. Transparansi Data Produksi: Data produksi minyak dan gas dapat diakses secara publik untuk mengurangi potensi manipulasi data oleh perusahaan.

Contoh Implementasi:

- Di Norwegia, pemerintah menggunakan sistem pelaporan berbasis blockchain untuk memastikan transparansi dalam aliran dana dari sektor ekstraktif (Auty, 2018). Blockchain memungkinkan pencatatan data yang tidak dapat dimanipulasi.

Manfaat Teknologi dalam Transparansi

- Meningkatkan kepercayaan publik: Teknologi digital membuat data lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Mengurangi korupsi: Dengan pencatatan digital, peluang untuk memanipulasi data dan melakukan korupsi berkurang secara signifikan.

- Pengambilan keputusan berbasis data: Informasi real-time memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan sumber daya alam.

4. Reformasi Kebijakan Perusahaan

Perusahaan yang bergerak di sektor ekstraktif memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa aktivitas mereka memberikan manfaat maksimal bagi daerah tempat mereka beroperasi. Reformasi kebijakan internal perusahaan diperlukan untuk menciptakan kejelasan terkait alokasi dana dan pembagian hasil eksploitasi.

Langkah reformasi:

1. Publikasi Laporan Keuangan: Perusahaan wajib mempublikasikan laporan keuangan yang mencakup pendapatan, pembayaran pajak, royalti, dan kontribusi lainnya kepada pemerintah daerah.
2. Transparansi Dana CSR: Dana yang dialokasikan untuk Corporate Social Responsibility (CSR) harus dipublikasikan secara terbuka, termasuk program apa saja yang dibiayai dan manfaat yang dihasilkan.
3. Standar Transparansi Internasional: Perusahaan dapat mengadopsi standar internasional seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan mereka.

Sistem pelaporan yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengetahui informasi yang relevan terkait aktivitas perusahaan, termasuk data produksi, kontribusi terhadap pendapatan daerah, dan dampak sosial serta lingkungan.

Komponen utama sistem pelaporan terbuka:

1. Pelaporan Berbasis Digital: Perusahaan dapat menggunakan platform online untuk menyediakan informasi terkini kepada masyarakat.
2. Pemantauan Independen: Laporan yang dipublikasikan harus diaudit oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan keakuratan dan kredibilitasnya.
3. Penyampaian yang Mudah Dipahami: Data yang disajikan harus dalam format yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat umum.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peran aktif pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi, serta reformasi kebijakan perusahaan. Pemerintah daerah harus memperkuat regulasi lokal dan bekerja sama dengan lembaga pengawas eksternal untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif. Teknologi digital dapat menjadi alat utama dalam meningkatkan transparansi melalui pelaporan dan pemantauan secara real-time. Di sisi lain, perusahaan ekstraktif perlu menjalankan reformasi kebijakan untuk memastikan bahwa

alokasi dana dan pembagian hasil eksploitasi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan strategi ini, sektor ekstraktif diharapkan dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan daerah.

Bab 7

Mewujudkan Transparansi: Implementasi dan Pemantauan Kebijakan di Industri Minyak dan Gas

1. Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan Transparansi

Implementasi strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ekstraktif di Kabupaten Bojonegoro memerlukan rencana aksi yang terperinci dan komprehensif. Rencana aksi ini harus mencakup langkah-langkah yang dapat diukur dan dimonitor secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai dengan efektif. Berikut adalah beberapa langkah implementasi yang dapat diterapkan:

1. Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Lokal yang Mendukung Transparansi: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun dan memperbarui peraturan daerah yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif. Hal ini mencakup kebijakan terkait pelaporan keuangan, pembayaran royalti, dan pendistribusian dana bagi hasil dari sektor minyak dan gas bumi. Misalnya, Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait pendapatan dan kontribusi kepada pemerintah daerah.
2. Pembentukan Forum Komunikasi Multi-Pihak: Untuk meningkatkan transparansi, perlu dibentuk forum

komunikasi yang melibatkan semua pihak terkait, seperti pemerintah, perusahaan, LSM, dan masyarakat. Forum ini dapat digunakan untuk membahas isu-isu seputar pengelolaan sektor ekstraktif, serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang ada.

3. Pembangunan Platform Digital untuk Pelaporan dan Pemantauan: Sebagai bagian dari implementasi, pemerintah daerah dapat mengembangkan platform digital untuk memfasilitasi pelaporan dan pemantauan aktivitas sektor ekstraktif secara terbuka. Platform ini harus memungkinkan akses yang mudah bagi masyarakat untuk melihat data produksi, pendapatan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ekstraktif.
4. Penyusunan Panduan dan Standar Pengawasan oleh Lembaga Independen: Lembaga pengawas independen, seperti auditor eksternal atau organisasi masyarakat sipil, dapat diminta untuk menyusun panduan pengawasan yang objektif dan transparan. Standar ini akan membantu dalam memonitor apakah perusahaan-perusahaan ekstraktif benar-benar menjalankan kebijakan dan regulasi yang telah disepakati.

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pengawas harus bekerja sama dalam

merancang dan melaksanakan kebijakan ini. Berikut adalah cara melibatkan berbagai pihak dalam implementasi kebijakan:

1. Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan. Mereka perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berfokus pada transparansi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

2. Perusahaan Ekstraktif: Perusahaan yang beroperasi di sektor ekstraktif harus berkomitmen untuk mengikuti regulasi yang berlaku dan berperan aktif dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Kolaborasi dengan perusahaan penting untuk memastikan mereka mematuhi kebijakan yang ada, serta menjalankan program CSR yang transparan.

3. Masyarakat dan LSM: Masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum komunikasi yang dibentuk. LSM, sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, dapat berfungsi sebagai pengawas independen untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik.

4. Lembaga Pengawasan Independen: Lembaga pengawasan eksternal, seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau organisasi internasional seperti EITI

(Extractive Industries Transparency Initiative), perlu dilibatkan untuk memberikan audit dan evaluasi objektif terkait pelaksanaan kebijakan dan regulasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk menilai kemajuan implementasi kebijakan yang diterapkan di sektor ekstraktif. Beberapa sistem yang dapat diterapkan antara lain:

1. Sistem Pelaporan Berkala: Pemerintah dapat mengimplementasikan sistem pelaporan berkala di mana perusahaan diwajibkan untuk melaporkan data produksi, pendapatan, dan kontribusi mereka kepada pemerintah daerah setiap triwulan atau tahunan. Pelaporan ini harus terbuka dan mudah diakses oleh publik.
2. Sistem Pemantauan Berbasis Teknologi: Platform digital yang dibangun untuk tujuan transparansi dapat juga digunakan sebagai alat pemantauan untuk memantau kemajuan implementasi kebijakan. Misalnya, pemerintah daerah dapat melacak seberapa sering dan tepat waktu laporan diterima dari perusahaan, serta mengevaluasi apakah mereka mematuhi regulasi yang ada.
3. Audit Independen: Lembaga pengawas eksternal, seperti auditor independen, dapat melakukan audit terhadap laporan yang disampaikan oleh perusahaan untuk

memastikan kebenaran dan keakuratan informasi. Hasil audit ini harus dipublikasikan agar masyarakat dapat memantau apakah perusahaan memenuhi kewajiban transparansi mereka.

4. Forum Pengawasan Berkala: Forum yang melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga pengawas dapat diadakan secara berkala untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan telah efektif dan untuk menyelesaikan isu-isu yang muncul di lapangan.

Indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan transparansi dan akuntabilitas ini mencakup:

1. Peningkatan Keterbukaan Informasi: Salah satu indikator utama adalah tingkat keterbukaan informasi yang disediakan oleh perusahaan dan pemerintah. Semakin banyak data yang tersedia untuk publik mengenai pendapatan, royalti, dan dampak lingkungan, semakin baik implementasi kebijakan.

2. Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum komunikasi dan pengawasan sektor ekstraktif juga menjadi indikator keberhasilan. Semakin banyak masyarakat yang aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan, semakin besar peluang kebijakan tersebut untuk berhasil.

3. Pengurangan Dampak Negatif Sosial dan Lingkungan: Salah satu tujuan dari transparansi dan akuntabilitas adalah untuk mengurangi dampak negatif sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, indikator lain adalah pengurangan keluhan masyarakat terkait dampak buruk sektor ekstraktif, seperti pencemaran atau kerusakan infrastruktur lokal.

Namun, tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi kebijakan ini antara lain:

- Perlawanan dari perusahaan: Beberapa perusahaan mungkin tidak mendukung kebijakan transparansi yang lebih ketat karena dianggap mengancam keuntungan mereka.
- Keterbatasan sumber daya pemerintah: Pemerintah daerah mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran dan kapasitas untuk menjalankan kebijakan pengawasan yang efektif.
- Ketidakberdayaan masyarakat: Masyarakat mungkin merasa kesulitan dalam menuntut akuntabilitas dari perusahaan atau pemerintah, terutama jika mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka atau tidak memiliki saluran yang efektif untuk melaporkan pelanggaran.

3. Studi Kasus: Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi di Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro, sebagai salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia, telah melaksanakan berbagai kebijakan terkait pengelolaan sektor ekstraktif. Beberapa kebijakan ini telah berhasil, namun ada juga yang belum sepenuhnya efektif.

Keberhasilan Implementasi Kebijakan:

1. Peningkatan Keterbukaan Data Produksi dan Keuangan: Salah satu contoh keberhasilan adalah penerapan sistem pelaporan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses data produksi minyak dan gas bumi secara real-time. Inisiatif ini meningkatkan transparansi dan memungkinkan pengawasan yang lebih baik oleh masyarakat dan lembaga pengawas eksternal.
2. Pembentukan Forum Komunikasi: Forum yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan ekstraktif secara berkala telah terbukti efektif dalam menciptakan komunikasi dua arah antara pihak-pihak yang terlibat. Forum ini memungkinkan diskusi terbuka mengenai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan solusi yang dapat ditemukan bersama.

Kegagalan Implementasi Kebijakan:

1. Ketidakmerataan Pembagian Keuntungan: Meskipun kebijakan pembagian hasil telah ditetapkan, sebagian besar masyarakat Bojonegoro masih merasa bahwa

keuntungan dari sektor ekstraktif tidak dibagi secara adil. Sebagian besar keuntungan tetap masuk ke perusahaan dan pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal merasa manfaat yang diterima sangat terbatas.

2. Kurangnya Pengawasan Lingkungan: Beberapa kebijakan terkait pengawasan dampak lingkungan masih belum efektif. Aktivitas ekstraktif di beberapa wilayah Bojonegoro telah menimbulkan pencemaran air dan tanah yang belum ditangani dengan baik.

Dari evaluasi kebijakan yang diterapkan di Bojonegoro, beberapa pelajaran yang dapat diambil adalah:

- Pentingnya Penyuluhan kepada Masyarakat: Agar kebijakan dapat diterima dan dipahami dengan baik, penting bagi pemerintah untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan.
- Peningkatan Kapasitas Pengawasan Pemerintah: Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan mereka, baik dari sisi anggaran, tenaga ahli, maupun sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel.

Bab 8

Kesimpulan dan Harapan : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Ekstraktif

1. Kesimpulan

Buku ini telah menyelami secara mendalam tantangan dan potensi yang ada dalam sektor ekstraktif di Kabupaten Bojonegoro, serta bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan penelitian, analisis, dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, berikut adalah ringkasan temuan utama buku ini.

Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi. Kabupaten ini memiliki potensi yang sangat besar dalam hal kontribusi terhadap perekonomian nasional, namun pemanfaatan sumber daya alam tersebut juga menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu isu utama yang teridentifikasi adalah ketidakseimbangan dalam distribusi keuntungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakpuasan masyarakat yang merasa tidak memperoleh manfaat yang sebanding dengan kerusakan lingkungan dan sosial yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam.

Bojonegoro memiliki sejumlah pemain utama dalam sektor ekstraktif, yang terdiri dari perusahaan-perusahaan besar, pemerintah daerah, serta masyarakat lokal. Meskipun perusahaan-perusahaan ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah melalui pajak dan royalti, sering kali transparansi dan akuntabilitas mereka kurang diperhatikan. Pemerintah daerah, meskipun telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, juga menghadapi kendala dalam pengawasan yang efektif dan penerapan kebijakan yang berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi di Bojonegoro, memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan. Dalam praktiknya, meskipun beberapa langkah telah dilakukan, implementasi transparansi dan akuntabilitas masih menghadapi banyak tantangan. Pembentukan platform pelaporan digital, pengawasan berbasis masyarakat, dan keberadaan lembaga pengawas independen adalah beberapa langkah yang dapat memperkuat transparansi di sektor ini.

Namun, tantangan birokrasi, ketidakberdayaan masyarakat, serta kurangnya mekanisme yang memadai untuk pengawasan menjadi hambatan besar dalam mencapainya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan,

masyarakat, dan lembaga pengawas eksternal untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih transparan.

Langkah-langkah implementasi kebijakan yang sudah diambil di Bojonegoro, seperti pembentukan forum komunikasi dan penerapan platform digital untuk pelaporan, mulai menunjukkan hasil positif. Namun, untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut, dibutuhkan penguatan kapasitas pengawasan pemerintah daerah dan partisipasi aktif dari masyarakat. Indikator keberhasilan kebijakan harus terus dipantau dan dievaluasi dengan cermat, untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, serta untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.

Meskipun banyak kebijakan telah dicanangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Bojonegoro, tantangan yang masih dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan informasi yang transparan, serta hambatan politik dan birokrasi yang sering memperlambat implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, pembagian keuntungan yang tidak merata antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat masih menjadi masalah besar yang perlu segera diselesaikan.

2. Harapan untuk Masa Depan

Ke depan, harapan terbesar bagi Kabupaten Bojonegoro adalah bagaimana sektor industri ekstraktif dapat dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan tiga aspek penting: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan berarti bahwa sektor ekstraktif dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, tanpa merusak lingkungan atau mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang.

Harapan utama untuk Bojonegoro adalah:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal: Masyarakat Bojonegoro seharusnya dapat merasakan manfaat yang nyata dari eksploitasi sumber daya alam. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Pemanfaatan sumber daya alam di Bojonegoro harus mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya kebijakan yang lebih tegas terhadap pengelolaan dampak lingkungan, diharapkan daerah ini dapat menjadi contoh dalam mengelola sumber daya alam secara lebih ramah lingkungan.
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan: Masyarakat Bojonegoro harus diberikan kesempatan lebih

besar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap kebijakan yang ada.

4. Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan: Kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah perlu mendukung inisiatif-inisiatif masyarakat dan memperkuat peran lembaga pengawas independen untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ekstraktif memenuhi kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif di Bojonegoro memerlukan pendekatan jangka panjang yang mencakup perubahan sistemik dalam kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan keterlibatan masyarakat. Berikut adalah beberapa rekomendasi jangka panjang yang dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas:

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Lokal: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu memperkuat regulasi lokal yang memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini mencakup kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan laporan keuangan secara terbuka, mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan

lingkungan yang diakibatkan oleh operasional mereka, serta membangun sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk menciptakan kesadaran kolektif. Melalui pendidikan, masyarakat dapat diberdayakan untuk lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan.

3. Mendorong Inovasi Teknologi dalam Pengawasan: Teknologi dapat memainkan peran besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemanfaatan platform digital untuk pemantauan dan pelaporan data secara real-time akan memberikan masyarakat akses yang lebih luas dan mudah untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan.

4. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengawas: Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan transparansi dan akuntabilitas adalah kurangnya kapasitas pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, perlu ada investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah dan lembaga pengawas eksternal. Hal ini juga dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga

internasional untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan objektif.

5. Membangun Sistem Pembagian Keuntungan yang Adil: Pembagian keuntungan dari sektor ekstraktif harus dilakukan dengan cara yang adil dan merata. Pemerintah harus memastikan bahwa sebagian besar pendapatan yang dihasilkan dari sektor ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk dalam bentuk program CSR yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan penyediaan lapangan kerja.

Sebagai kesimpulan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ekstraktif di Kabupaten Bojonegoro bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Dibutuhkan kerjasama yang solid antara berbagai pemangku kepentingan dan upaya berkelanjutan untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Bojonegoro dapat menjadi model bagi daerah lain dalam pengelolaan sektor ekstraktif yang lebih terbuka, akuntabel, dan berkelanjutan, jika kebijakan yang ada didukung dengan komitmen kuat dan implementasi yang efektif.

Daftar Pustaka

Buku

Aghion, P., & Tirole, J. (1997). *Formal and Informal Control in Organizations*. Journal of Political Economy, 105(5), 1-14.

Andersen, M. S., & Tushman, M. L. (2014). *Managing the Triple Bottom Line in Extractive Industries: Key to Sustainable Development*. Springer.

Bell, S., & Morse, S. (2013). *Sustainability Indicators: Measuring the Immeasurable?* Earthscan.

Botchwey, K., & McPherson, M. (2016). *Institutionalizing Transparency and Accountability in Resource Management*. Oxford University Press.

Coyle, D., & Green, S. (2010). *The Politics of Transparency: Rebuilding Trust in Government*. Palgrave Macmillan.

Daniel, S. A. (2018). *Oil, Gas, and the Politics of Transparency in Developing Nations*. Routledge.

Fischer, F., & Green, T. (2018). *Public Administration and the Ethics of Transparency*. McGraw-Hill Education.

Harris, C., & Hoag, D. (2012). *Extractive Industries and Development: Moving Towards a Policy Framework*. Springer.

Heemskerk, M., & Koning, J. (2016). *Corporate Social Responsibility and Resource Extraction: Perspectives from the Global South*. Cambridge University Press.

Kaldor, M. (2015). *The Globalization of Politics: Transparency, Accountability, and Governance*. Wiley.

Jurnal Internasional

Ben Hooren, D., & Lee, M. (2014). "Government Transparency and Economic Growth: A Global Perspective." *World Development*, 53, 29-40.

Bodenheimer, J., & Franklin, G. (2017). "Monitoring and Evaluation of Transparency Mechanisms in Extractive Industries." *Journal of Energy Policy*, 103(4), 90-100.

Boudet, M., & Thistlewaite, K. (2019). "The Role of Transparency in Addressing Corruption in Extractive Industries." *Journal of Resource Policy*, 15(2), 155-170.

Castells, M. (2013). "The Transparency Revolution: A Critical Perspective." *Global Media Journal*, 12(1), 22-35.

Cuffe, E. (2021). "Accountability in Extractive Industry Governance: A Study of Transparency Mechanisms in Indonesia." *Asian Journal of Public Administration*, 38(4), 480-495.

Devarajan, S., & Khemani, S. (2018). "Transparency and Governance: The Impact on Economic Growth and

Development." *World Bank Policy Research Working Paper*, 8486.

Fekete, H., & O'Neill, S. (2017). "Public Transparency and Social Mobilization in Resource Extraction." *Energy and Environment*, 28(3), 249-263.

Green, R., & Luciani, G. (2020). "Governance and Transparency in Oil and Gas Industries: Lessons from the Middle East." *Journal of Energy Governance*, 15(2), 92-110.

Gupte, R. (2015). "How Transparency Affects the Extractive Sector in Developing Countries." *Resource Governance Journal*, 10(2), 45-58.

Houghton, M., & Johnson, F. (2022). "Implementing Transparency Policies in Extractive Industries: Evidence from Sub-Saharan Africa." *International Development Studies Journal*, 26(1), 70-85.

Laporan dan Sumber Pemerintah

Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia. (2021). *Annual Report on Extractive Industries in Indonesia*. Jakarta: Government Printing Office.

OECD. (2017). *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises and Extractive Industry Transparency*. OECD Publishing.

Open Government Partnership. (2019). *Annual Report on Transparency in the Oil and Gas Sector*. Washington DC: OGP.

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). (2020). *EITI Standard: Promoting Transparency in Extractive Industries*. Oslo: EITI Secretariat.

Artikel Media dan Laporan Industri

Ahlstrom, D. (2021). "Reforming Oil and Gas: New Standards for Transparency." *The New York Times*.

Bain, D. (2020). "Transparency and Extractive Industries: A Growing Challenge." *The Guardian*.

Goodwin, P. (2020). "The Cost of Transparency: Ethical Dilemmas in Extractive Industries." *Harvard Business Review*.

Hansen, J. (2021). "How Transparency Enhances Accountability in Extractive Industries." *Financial Times*.

Holman, L., & King, R. (2019). "Mapping Corporate Transparency in the Extractive Sector." *The Economist*.

Sumber Web dan Laporan Lembaga Internasional

International Monetary Fund (IMF). (2019). *Extractive Industries Transparency: Strengthening the Global Governance Framework*. IMF Report.

International Resource Panel (IRP). (2018). *Transparency and Governance in Resource Extraction: Challenges and Solutions*. UNEP.

International Transparency Institute. (2021). *Global Transparency Index on Resource Governance*. Berlin: Transparency International.

Open Society Foundations. (2020). *The Impact of Transparency Initiatives on Extractive Industries*. OSF Reports.

Publish What You Pay. (2021). *Annual Report on Extractive Transparency in Global Oil and Gas Sectors*. PWYP.

Dokumen Kebijakan dan Peraturan

Government of Indonesia. (2020). *Regulation No. 77/2020 on Transparency in Resource Extraction*. Jakarta: Ministry of Energy and Mineral Resources.

World Bank Group. (2019). *Guidelines for Transparent Reporting in Extractive Industries*. Washington, DC: World Bank.

United Nations Economic Commission for Africa (UNECA). (2017). *Sustainable Governance in Extractive Industries*. Addis Ababa: UNECA.

Sumber Lain

Laar, A., & Asongu, S. (2020). "Managing Natural Resources: A Comparative Study of Transparency Practices in Africa."

International Journal of Development Studies, 13(3), 150-165.

Martinez, M. (2018). "Building Trust in Extractive Industries: The Role of Transparency and Accountability." *Development and Change*, 49(6), 1295-1312.

Naylor, M., & Roberts, A. (2016). "The Role of External Audits in Strengthening Transparency in the Extractive Sector." *Journal of Public Administration*, 44(1), 75-89.

Indeks

A

Akuntabilitas

- Definisi dan pentingnya dalam sektor ekstraktif, 45
- Proses akuntabilitas perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat, 132-135
- Pengawasan publik dan peran lembaga independen, 140-145

Alokasi Dana

- Penggunaan dana hasil eksploitasi, 102-104
- Pembagian hasil antara pemerintah dan masyarakat, 67-70

Analisis Data

- Metodologi analisis dalam studi kasus, 12-18
- Teknik pengolahan data survei, 18-108

Apendiks

- Daftar studi kasus, 20-25
- Data survei masyarakat, 30-35

B

Bojonegoro

- Sejarah industri ekstraktif di, 12-14
- Geografi dan ekonomi, 15-20
- Industri minyak dan gas bumi, 30-35
- Kebijakan transparansi dan akuntabilitas, 70-75
- Tantangan pengelolaan sumber daya alam di, 100-110

Birokrasi

- Hambatan birokrasi dalam implementasi kebijakan, 50-55

Budaya Perusahaan

- Pengaruh budaya perusahaan terhadap transparansi, 15-55

C

Colaboration

- Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam sektor ekstraktif, 130-135
- Pembentukan forum komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, 140-145

D

Dana Ekstraktif

- Penggunaan dan alokasi dana hasil eksploitasi, 102-104

- Dampak penggunaan dana terhadap ekonomi lokal, 110-115

Data Survei

- Persepsi masyarakat terhadap transparansi, 20-25
- Hasil survei partisipasi masyarakat, 23-25

Desentralisasi

- Pengaruh desentralisasi terhadap pengelolaan sumber daya alam, 40-45
- Peran pemerintah daerah dalam kebijakan ekstraktif, 60-65

E

Ekonomi Lokal

- Dampak sektor ekstraktif terhadap ekonomi daerah, 30-35
- Pendapatan masyarakat Bojonegoro dari sektor ekstraktif, 115-120

Eksploitasi Sumber Daya Alam

- Dampak eksploitasi terhadap masyarakat lokal, 44-50
- Regulasi terkait eksploitasi sumber daya alam, 63-65

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

- Implementasi di Bojonegoro, 99-105

- Prinsip dasar EITI, 110-115

F

Forum Komunikasi

- Pembentukan forum komunikasi untuk transparansi, 140-145
- Peran forum komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, 130-135

G

Good Governance

- Prinsip good governance dalam sektor ekstraktif, 75-80
- Hubungan antara governance dan transparansi di Bojonegoro, 105-110

H

Hambatan Birokrasi

- Hambatan dalam mendorong transparansi, 50-55
- Kebijakan terkait birokrasi dan transparansi, 60-65

Hubungan Pemerintah dan Perusahaan

- Kolaborasi untuk pengelolaan sumber daya alam, 125-130

I

Indikator Keberhasilan

- Indikator keberhasilan implementasi transparansi, 80-85
- Evaluasi implementasi kebijakan, 90-95

Industri Ekstraktif

- Definisi dan sektor terkait, 9-12
- Perkembangan industri ekstraktif di Bojonegoro, 30-40
- Pengaruh terhadap perekonomian lokal, 45-50

Industri Minyak dan Gas

- Sejarah dan perkembangan di Bojonegoro, 30-35
- Pemain utama dalam industri, 45-50

K

Kebijakan Pemerintah Daerah

- Kebijakan daerah terkait sektor ekstraktif, 60-65
- Regulasi dan kebijakan lokal, 72-75
- Peran dalam transparansi dan akuntabilitas, 70-75

Kolaborasi Pemerintah dan Perusahaan

- Keberhasilan dan tantangan dalam kolaborasi, 132-135
- Pembentukan forum komunikasi, 140-145

Keterlibatan Masyarakat

- Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, 85-90
- Pembentukan forum komunikasi dengan pemerintah dan perusahaan, 140-145

L

Lembaga Pengawas

- Peran lembaga pengawas eksternal dalam pengawasan industri ekstraktif, 125-130
- Pengawasan publik dan lembaga independen, 140-145

M

Masyarakat Lokal

- Keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya alam, 55-60
- Kepuasan terhadap kebijakan transparansi, 20-25
- Dampak eksploitasi terhadap masyarakat, 110-115

Monitoring Kebijakan

- Sistem monitoring implementasi kebijakan transparansi, 17-19
- Indikator keberhasilan dan tantangan dalam monitoring, 80-85

P

Pengawasan

- Mekanisme pengawasan terhadap dana eksploitasi, 60-65
- Pengawasan publik dan lembaga independen, 120-125

Partisipasi Masyarakat

- Keterlibatan masyarakat dalam transparansi, 85-90
- Strategi untuk meningkatkan partisipasi, 15-55

Perusahaan Ekstraktif

- Peran dan kebijakan perusahaan dalam pengelolaan sumber daya alam, 40-45
- Kebijakan transparansi perusahaan, 100-104
- Dampak terhadap ekonomi lokal, 110-115

S

Sektor Ekstraktif

- Definisi dan sektor terkait, 9-12
- Dampak terhadap ekonomi daerah, 30-35
- Peran pemerintah dan perusahaan, 45-50

Studi Kasus

- Daerah lain yang berhasil menerapkan transparansi, 115-120

- Evaluasi kebijakan di Bojonegoro, 90-95

Sumber Daya Alam

- Potensi di Bojonegoro, 12-15
- Eksploitasi minyak dan gas, 30-40
- Pengelolaan dan dampaknya, 50-55

T

Transparansi

- Definisi dan pentingnya dalam sektor ekstraktif, 45-50
- Mekanisme transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, 55-60
- Pengelolaan sumber daya alam secara terbuka, 80-85
- Dampaknya terhadap pengambilan keputusan, 115-120

Tantangan

- Tantangan dalam mendorong transparansi, 50-55
- Tantangan dalam meningkatkan akuntabilitas, 100-105
- Pembagian keuntungan yang tidak adil, 130-135

Z

Zona Ekstraktif

- Perkembangan industri minyak dan gas di, 20-25

- Dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, 40-45

FAKULTAS & PRODI

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	KEUNGGULAN KOMPETITIF	KEUNGGULAN KOMPARATIF
MIPA	Matematika **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam bidang Matematika dan Ilmu Komputer	1. Statistik 2. Pemodelan Matematika 3. Ilmu Komputer
HUKUM	Ilmu Hukum **(Terakreditasi B)**	Ahli dalam bidang hukum	1. Hakim 2. Jaksa 3. Pengacara 4. Notaris
FKIP	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia **(Terakreditasi Baik Sekali)**	Ahli dalam bidang perencanaan, penelitian, pengajaran dan tata kelola kelembagaan	1. Pendidik 2. Jurnalis atau Wartawan 3. Penulis dan Editor 4. Penyiar/Presenter
	Pend. Bahasa Inggris **(Terakreditasi Baik Sekali)**	Ahli dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, Linguistik dan Kesastraan	1. Tenaga pendidik Bahasa Inggris 2. Asisten penelitian Bahasa Inggris 3. Edupreneur Bahasa Inggris 4. Penulis Kreatif
	Pend. Matematika **(Terakreditasi Baik Sekali)**	Ahli dalam bidang perencanaan, analis data, pengajaran, penelitian	1. Pendidikan Matematika 2. Peneliti pendidikan matematika 3. Calon pebelajar tingkat magister Analis kebijakan pendidikan
EKONOMI	Manajemen **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam bidang manajemen keuangan dan pemasaran	1. Wirausaha UMKM 2. Konsultan manajemen
	Akuntansi **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam akutansi keuangan	1. Akutansi BANK 2. Perbankan
FAI	Pend. Agama Islam **(Terakreditasi B)**	1. Pendidikan profesional 2. Peneliti pemula 3. Pengelola lembaga pendidikan	1. Ahli dalam bahasa arab dan inggris keislaman 2. Pengembangan masyarakat dan keagamaan
	Pend. Bahasa Arab **(Terakreditasi Baik)**	1. Pendidikan guru B. Arab 2. Peneliti pemula B. Arab 3. Penerjemah 4. Pemandu Haji, Umroh	1. Penerjemah 2. Guru 3. Telaah kitab kuning
	Pend. Islam Anak Usia Dini **(Terakreditasi Baik Sekali)**	1. Pendidik 2. Peneliti 3. Konsultan anak 4. Eduprenuer	1. Guru RA, TK, PAUD 2. Pengelola lembaga pendidikan AUD 3. Peneliti bidang pendidikan AUD
	Ekonomi Syariah **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam ekonomi Islam	1. Manajemen keuangan syariah 2. Pengembangan kewirausahaan
	Pend. Guru MI **(Terakreditasi Baik Sekali)**	1. Pendidikan 2. Peneliti pemula	1. Ahli guru MI
PERTANIAN	Agroteknologi **(Terakreditasi B)**	Ahli dalam pengelolaan budidaya tanaman	1. Pengelolaan teknologi hasil pertanian dan kewirausahaan
TEKNIK	Teknik Sipil **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam bidang perencanaan teknik sipil	1. Ahli dalam perencanaan jalan-jalan dan transportasi 2. Ahli dalam perencanaan konstruksi hidro atau keairan
	Arsitektur **(Terakreditasi B)**	Ahli dalam perencanaan bidang arsitektur	1. Ahli perencanaan kota, perumahan, dan pemukiman 2. Ahli perencanaan lansekap dan sains bangunan
	Informatika **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam perencanaan bidang informatika	1. Praktisi IT 2. Pengembang Software
FISIP	Ilmu pemerintahan **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam perencanaan kebijakan pemerintah	1. Ahli dalam bidang public policy dan strategi 2. LSM
	Ilmu Politik **(Terakreditasi B)**	Ahli dalam bidang politik	1. Ahli dalam politik nasional dan regional
PASCASARJANA	Magister Pend. Bahasa & Sastra Indonesia **(Terakreditasi B)**	Kompeten dalam pendidikan mutakhir	1. Peneliti pendidikan 2. Pengembangan pendidikan inovatif
	Magister Pend. Agama Islam **(Terakreditasi Baik Sekali)**	Kompeten dalam pendidikan mutakhir agama islam	1. Pendidik Pendidikan Agama islam 2. Pengembang kurikulum pendidikan agama islam

Fasilitas

1. Tenaga pengajar berkualitas, lulusan kampus terkemuka dalam dan luar negeri dengan jenjang doktor dan magister. Laboratorium MIPA, Bahasa, Komputer, Microteaching, Lab. Pertunjukan & Sinematografi, Teknik (Sipil/Arsitek), Green House, Akuntansi, Peradilan Semu, Hotspot / WIFI 24 Jam.
2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Musik, Teater, Palang Merah Indonesia, Banjari, Olah Raga, Jurnalistik, Paduan Suara, Mapala, Resimen, Majalah /Buletin, dll.
3. Jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah, mahkamah konstitusi RI, KPPU, Bakesbang Prop Jawa Timur, media massa. Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dalam dan Luar Negeri.
4. Tersedia LCD projector di setiap ruang kelas.
5. Dekat dengan beberapa pondok pesantren dan tersedia bus antar jemput dari PP. Matholiul Anwar ke kampus.
6. Suasana kampus yang asri dengan budaya multi cultural (mahasiswa dari berbagai profesi dan negara)
7. Gedung Sabudga sebagai sarana olah raga & budaya serta acara resmi dengan kapasitas 2500 orang.

BEASISWA

1. Jalur penerimaan siswa berbakat dan berprestasi (baik tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, dan nasional).
2. Beasiswa keringanan SPP bagi mahasiswa yang memiliki saudara kandung yang telah kuliah di Unisda.
3. Beasiswa Hafidz / Hafidzah 100% bebas DPP dan SPP.
4. Calon mahasiswa yang pernah menjadi ketua OSIS, IPNU IPPNU bebas biaya pendaftaran dan biaya PKKMB.
5. Tersedia ratusan beasiswa dari:
   a. Lembaga Pendidikan Islam & Sosial Darul `Ulum
   b. Beasiswa K.H. Masykuri
   c. Bantuan keringanan bagi yang kurang mampu
   d. Bidik Misi/KIP-K
   e. Baznas
   f. LLDIKTI
   g. BUMN/BUMD
   h. Al-Khidmah
   I. PKSDM
   j. UKT

Lain-Lain

1. Menerima mahasiswa transfer untuk semua jurusan.
2. Unisda tidak membuka kelas jauh.
3. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan via telepon, WA, email, facebook, atau SMS center.

Berdaya Saing Kuat I Mandiri I Berbudaya I Islami I Bertaraf Internasional

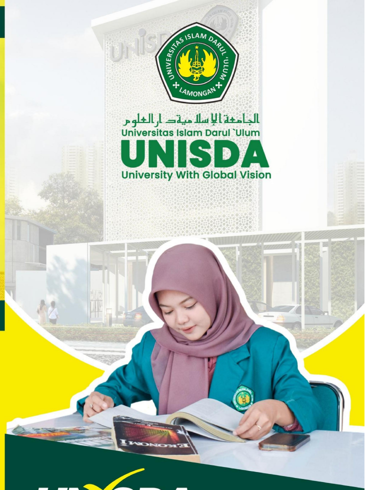

الجامعة الإسلامية دار العلوم
Universitas Islam Darul `Ulum
UNISDA
University With Global Vision

UNISDA UNIVERSITY with GLOBAL VISION

unisda.ac.id

PERSYARATAN UMUM

Berijasah SMA/SMK/MA dan berkelakuan baik

SYARAT DAN CARA PENDAFTARAN

1. Membayar Biaya Formulir Pendaftaran di Bank Jatim
2. Menyerahkan scan ijasah atau Surat Keterangan Lulus
3. Menyerahkan soft file foto terbaru ukuran 3x4
4. Menyerahkan Scan Kartu Keluarga
5. Biaya pendaftaran Rp 250.000

TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

Kantor Marketing, Humas, Admisi Mahasiswa Baru dan Urusan Internasional UNISDA Lamongan
Jl. Airlangga No. 03 Sukodadi Lamongan
Telp. (0322) 390497 | fax. (0322) 390929
WA : 0858-7733-0888
FB : Universitas Islam Darul `Ulum (UNISDA) Lamongan
IG : Unisda_Official
Email : humas@unisd.ac.id
Web : pmb.unisda.ac.id
Pendaftaran dibuka setiap hari kerja: pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

JALUR	TANGGAL
PSBB	06 JAN – 15 APRIL 2025
Gelombang 1	06 JAN – 03 JUN 2025
Gelombang 2	4 JUN – 20 AGST 2025
Gelombang 3	21 AGST – 12 SEPT 2025

Pendaftaran dibuka setiap hari Senin s.d. Jumat (untuk kelas karyawan: hari Jumat s.d. Minggu)

Waktu perkuliahan:
Pagi: 08.00 - 12.00 WIB
Sore: 15.20 - 20.00 WIB

LIST BIAYA

SCAN ME

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM DARUL `ULUM LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2025-2026

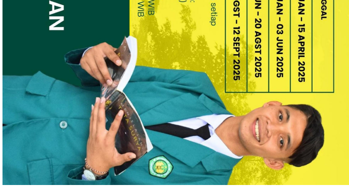

TOKOH & ALUMNI MENGENAI UNISDA

"Unisda diharapkan mampu mencetak generasi baru dibidang ekonomi syariah sebagai kemaslahatan umat"
Prof. Dr. (H. C.) KH. Ma'ruf Amin
(Wakil Presiden RI 2019-2024)

"Saya harapkan Unisda ke depan mampu melampaui prestasi-prestasi yang telah diraih sebelumnya."
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
(Wakil Presiden RI 2014-2019)

"Saya merasa ikut memiliki Unisda, sudah beberapa tahun ini Unisda bekerja sama dengan MKRI"
Prof. Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Saat Kunjungan ke Unisda th. 2012)

"Kita harus mulai membangun roadmap kita, dimana generasi muda (mahasiswa Unisda adalah tulang punggung kemajuan Indonesia, tulang punggung pembangunan roadmap atau ekosistem yang akan kita bangun."
Erick Tohir
(Menteri BUMN 2019-sekarang dan Ketua Umum PSSI)

"Setelah saya melihat Unisda, sudah bagus. tinggal dikembangkan untuk memasuki era internasional."
Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.
(Menristekdikti 2014-2019)

"Unisda diharapkan dapat mencetak generasi-generasi guru masa depan yang mumpuni"
Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia periode 2019-2024 Saat kunjungan tahun 2017)

"Mahasiswa Unisda bukan saja menjadi agent of change, tetapi juga agent of repair, karena hakikat dari intelektual adalah wajib menawarkan gagasan atas hal hal yang dilihat tidak benar."
AA Lanyalla Mahmud Mattalitti
(Ketua DPD Republik Indonesia)

"Ya Allah, Jadikanlah UNISDA ini sebagai sarana pendidikan, berkahilah tempat ini sebagai tempat menimba ilmu bagi hamba-hamba-Mu yang tertaqwa"
K.H. Ubaidillah Faqih
(Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban)

"Sebagai almamater saya bangga, karena saat in Unisda tetap berkembang tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai kampus yang menjunjung tinggi akademik yang dinamis"
Dr. Yuhranur Effendi, SH, S., MBA.
(Bupati Lamongan & Alumni Unisda)

PRESTASI

1. Sebagai Delegasi RI ke US Indonesia Higher Education Summit di Washington (internasional)
2. Sebagai peserta Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVII di Padang, Sumatrera Barat.
3. Pemecah Rekor MURI dalam kategori pembacaan puisi terlama (Nasional/Internasional)
4. Finalis PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional) di Kendari Sulawesi.
5. Juara 2 Futsal Mahasiswa di Univ. Adibuana Surabaya
6. Juara 3 MTQ Mahasiswa Regional IV Bidang Hifdzil Qur'an di Univ. Trunojoyo Madura.
7. Juara Harapan 1 Lomba Dialog Interaktif tingkat nasional "Pekan Trilomba Kebangsaan Ke-III" Univ. Negeri Malang
8. Juara 1 Microteaching tingkat nasional di UINSA Surabaya
9. Juara III dalam kegiatan Festival Seni Pencak Silat Virtual Nasional Lintang Jagad III.
10. Program MBKM dr Kemdikbudristek yg pernah diraih mhs Unisda:
    a. Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit (Permatasakti)
    b. Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 (PMM2)
    c. Kampus Mengajar 3, 4 dan 5
    d. Merdeka Belajar untuk Semua
    e. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)
    f. Bantuan Riset Talenta Riset dan Inovasi (BARISTA)
    h. Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)
11. Hibah MBKM yg didapat Unisda dari Kemdikbudristek
    a. PKKM (Program Kompetisi Kampus Merdeka) tahun 2021, 2022, 2023
    b. KMMI (Kredensial Mikro Mhs. Indonesia)
    c. Ditasering th 2021 & 2022
    d. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
    e. Program Studi Menerapkan Kerjasama MBKM

Rektor
ttd
M. Hafidh Nashrullah, S.E., M.M.

الجامعة الإسلامية دارالعلوم

Universitas Islam Darul Ulum

UNISDA - LAMONGAN

Jl. Airlangga 03 Sukodadi
Lamongan – Jawa Timur – 62254
https://unisda.ac.id

"Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas pada Sektor Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro" mengungkapkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia dalam menciptakan sektor ekstraktif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Kabupaten Bojonegoro, yang kaya akan sumber daya alam, menghadapi dilema besar dalam memastikan bahwa industri minyak dan gas bumi memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Buku ini menyajikan kajian mendalam tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif, serta bagaimana kedua aspek tersebut dapat meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Penulis menggali berbagai masalah terkait pengelolaan sumber daya alam, baik yang bersifat struktural, sosial, maupun ekonomi, serta menawarkan solusi konkret untuk memperbaiki tata kelola industri migas di Bojonegoro.

Dengan mengintegrasikan perspektif keberlanjutan, buku ini mengajukan langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan mendorong transparansi yang lebih besar dalam aliran pendapatan dari industri ekstraktif.

Dari studi kasus Bojonegoro, buku ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana peningkatan transparansi dan penguatan akuntabilitas dalam industri migas tidak hanya bermanfaat bagi pembangunan daerah, tetapi juga untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang lebih adil dan inklusif.

Buku ini sangat relevan bagi akademisi, praktisi kebijakan, pengelola industri, serta masyarakat yang ingin memahami lebih dalam mengenai pentingnya peran transparansi dalam memajukan sektor ekstraktif Indonesia menuju masa depan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

"Sebuah panduan kritis untuk mendorong perubahan positif dalam industri ekstraktif di Bojonegoro dan daerah sejenis, guna memastikan sumber daya alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama."

9 786238 941070

View publication stats